

LAPORAN BULANAN

FEBRUARI 2025

Badan Pangan Nasional
Februari, 2025

KATA PENGANTAR

Penyusunan laporan disusun sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Badan Pangan Nasional, maka Badan Pangan Nasional akan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap program dan kegiatan sesuai target yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Badan Pangan Nasional. Pemantauan dan evaluasi akan dilaksanakan secara periodik termasuk periode bulanan. Dalam hal ini kegiatan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan perbulan akan dilaporkan dalam Laporan Bulanan Badan Pangan Nasional. Hasil pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan yang dilakukan setiap bulan dapat dijadikan bahan masukan bagi seluruh unit kerja untuk meningkatkan kinerja pelayanan di unit kerja eselon I dan unit kerja eselon II. Selain itu, bahan dan data yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi, antara lain berupa instrument evaluasi dan instrument *best practice*, dapat digunakan sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan yang akan dipantau dan dievaluasi, bahkan dapat menjadi referensi untuk penyempurnaan Sebagaimana DIPA Awal Badan Pangan Nasional mendapat alokasi anggaran BA 125 milik Badan Pangan Nasional sebesar Rp. 329.957.285.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan alokasi di Satker Pusat Rp. 275.718.455.000,- dan di Satker Dekonsentrasi sebesar Rp.56.138.830.000,- untuk mendukung pelaksanaan Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen. Alokasi anggaran tersebut perlu dipantau pada bulan Januari tahun 2025 terutama terkait penggunaan anggaran se efisien dan efektif mungkin.

Kami berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan menjadi referensi untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan kedepan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran sangat kami harapkan dalam rangka menyajikan laporan yang lebih baik lagi.

Jakarta, Maret 2025
Plt. Sekretaris Utama



Sarwo Edhy



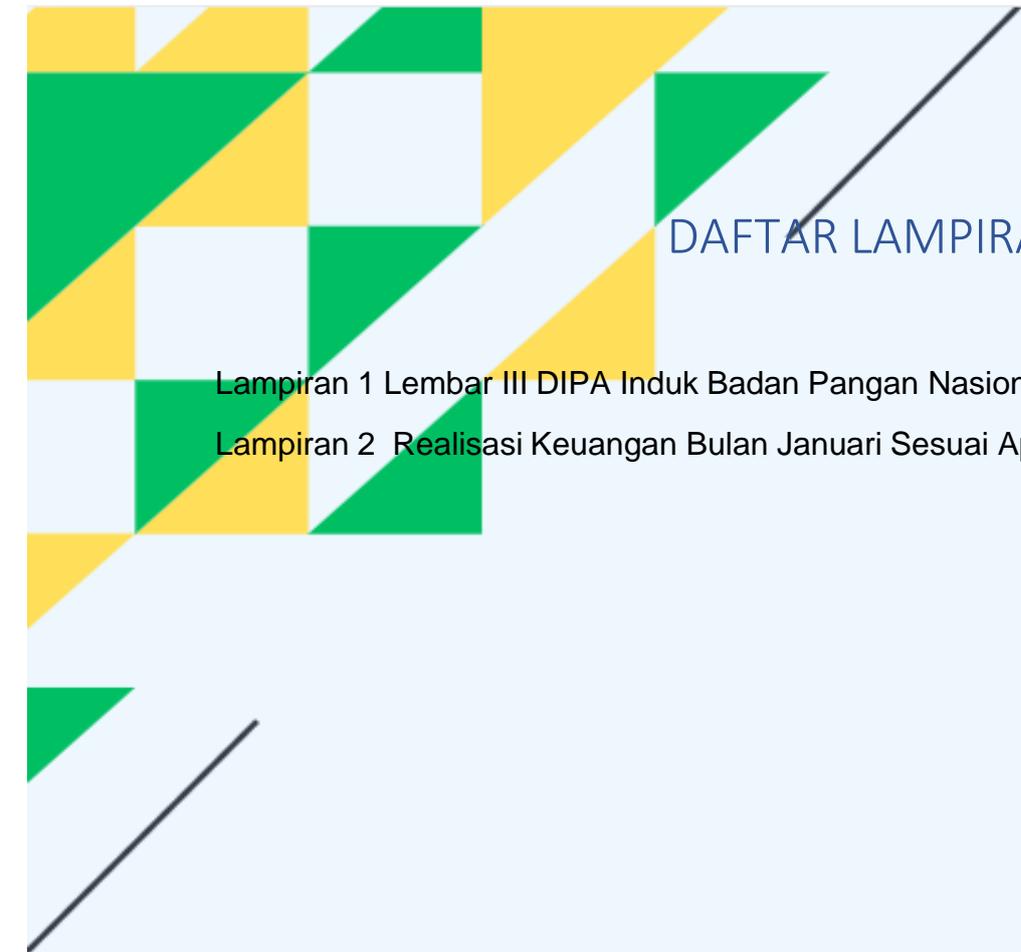
DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	1
1.3 Metode Penyusunan	1
BAB II RENCANA KINERJA OUTPUT	2
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN	10
3.1 Realisasi Fisik dan Keuangan.....	10
3.2 Monitoring Kegiatan Prioritas	19
3.3 Kegiatan Kepala Badan Pangan Nasional.....	51
BAB IV PENUTUP.....	59
4.1 Kesimpulan.....	59
4.2 Permasalahan	60
4.3 Rekomendasi.....	60
LAMPIRAN	60



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pagu Blokir Bulan Januari Tahun 2025 Sesuai DIPA Awal.....	2
Tabel 2. Target Fisim dan keuangan Bulan Janurai Tahun 2024 Sesuai DIPA Awal Tahun 2025.....	3
Tabel 3. Realisasi Keuangan Per Jenis Belanja Tahun 2025	10
Tabel 4. Realisasi Fisik dan Keuangan Per RO Bulan Januari Tahun 2025	10
Tabel 5. Realisasi Keuangan Per Kegiatan Bulan Januari Tahun 2025.....	18



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Lembar III DIPA Induk Badan Pangan Nasional Tahun 2025	61
Lampiran 2 Realisasi Keuangan Bulan Januari Sesuai Aplikasi SAKTI	62

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Pangan Nasional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2021 mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan dan Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2022 tentang Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024, Kepala Badan melakukan Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Badan Pangan Nasional. Dalam melakukan Pemantauan dan Evaluasi, Kepala Badan menugaskan pimpinan masing-masing unit kerja eselon I di Lingkungan Badan Pangan Nasional.

Laporan realisasi anggaran Badan Pangan Nasional bulan Januari tahun 2025 diharapkan dapat memberikan informasi mengenai hasil pelaksanaan program, kegiatan dan capaian kinerja Badan Pangan Nasional di tahun berjalan. Laporan ini sekaligus menjadi bahan masukan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja Badan Pangan Nasional pada masa yang akan datang.

1.2 Tujuan

1. Mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran lingkup Badan Pangan Nasional setiap bulan.
2. Melakukan pemantauan terhadap realisasi keuangan, keluaran, dan sasaran program lingkup Badan Pangan Nasional setiap bulan.

1.3 Metode Penyusunan

1. Mengumpulkan data dan informasi target dan capaian program, kegiatan, KRO dan Output dari UKE 1 dan UKE 2 dan aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dari Kementerian Keuangan.
2. Menganalisis data target fisik dan keuangan berdasarkan lembar ke-III DIPA dengan data realisasi fisik dan keuangan berdasarkan aplikasi SAKTI.
3. Menyajikan hasil analisis dalam laporan.

BAB II RENCANA KINERJA OUTPUT

Rencana kinerja output merupakan pencapaian dari sasaran strategis dan indikator kinerja Badan Pangan Nasional selama tahun 2025. Rencana kinerja output pada bulan Februari tahun 2025 akan dilihat dari dukungan pencapaian output/RO dan komponen sebagaimana target sesuai lembar III DIPA Awal pada bulan Januari Tahun 2025 Pada dokumen tersebut bulan Februari ditargetkan sebesar **1,95%**. Alokasi anggaran keseluruhan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional pada Tahun 2025 sebesar Rp. 329.957.285.000,- dengan alokasi di Satker Pusat sebesar Rp. 275.718.455.000,- dan Satker Dekonsentrasi pada 38 Provinsi se Indonesia total sebesar Rp.54.238.830.000,-. Untuk mendukung Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas sebesar Rp.158.654.628.000,- dan mendukung Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 117.063.827.000,-. Dari pagu Satker Pusat Rp.275.718.455.000,- sampai dengan periode laporan terdapat alokasi anggaran yang masih di blokir sebesar Rp.15.220.743.000,- dengan rincian per kegiatan sbb

Tabel 1.
Pagu Blokir Bulan Februari
Sesuai DIPA Awal Badan Pangan Nasional
Tahun 2025

URAIAN		PAGU BLOKIR (Rp)
JUMLAH SELURUHNYA		15.220.743.000
HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	12.390.236.000
HA.6875	Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	3.864.058.519
HA.6876	Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	8.074.178.000
HA.6877	Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	452.000.000
WA	Program Dukungan Manajemen	2.830.507.000
WA.6874	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	2.830.507.000

Laporan Badan Pangan Nasional Periode Bulan Februari Tahun 2025 khusus akan melaporkan pencapaian kinerja Satker Pusat (690590) Badan Pangan Nasional dengan target pada periode bulan Februari Tahun 2025 setelah dikurangi anggaran yang masih diblokir sebagaimana tersaji pada tabel 2 berikut:

Tabel 2.
Target Fisik dan Keuangan Bulan Februari Sesuai DIPA Awal
Badan Pangan Nasional Tahun 2025

URAIAN		PAGU NON BLOKIR			TARGET BULAN FEBRUARI	
		ANGGARAN (Rp)	FISIK		ANGGARAN (1,95%)	FISIK
JUMLAH SELURUHNYA		275.718.455.000			5.376.509.873	
HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	158.654628.000			3.093.765.246	
HA.6875	Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	64.792.789.000			1.263.459.386	
AEA	Koordinasi	16.103.433.000	8	Kegiatan	314.016.944	0
AEA.001	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan	3.232.364.000	6	Kegiatan	63.031.098	4
AEA.002	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan SPHP	2.107.919.000	1	Kegiatan	41.104.421	0
AEA.003	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan DCP	10.763.150.000	1	Kegiatan	209.881.425	1
AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	3.551.500.000	30	NSPK	69.254.250	
AFA.001	NSPK Ketersediaan Pangan	600.000.000	6	NSPK	11.700.000	0
AFA.002	NSPK Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	951.500.000	10	NSPK	18.554.250	1
AFA.003	NSPK Distribusi dan Cadangan Pangan	2.000.000.000	14	NSPK	39.000.000	0
PBR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	9.031.205.000	20	Rekomendasi	176.108.498	
PBR 001	Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan	1.851.205.000	2	Rekomendasi	36.098.498	0

URAIAN		PAGU NON BLOKIR			TARGET BULAN FEBRUARI	
		ANGGARAN (Rp)		FISIK	ANGGARAN (1,95%)	FISIK
PBR 002	Rekomendasi Kebijakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	3.180.000.000	12	Rekomendasi	62.010.000	
PBR 003	Rekomendasi Kebijakan Distribusi dan Cadangan Pangan	4.000.000.000	6	Rekomendasi Kebijakan	78.000.000	
QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	4.250.000.000	52	Klp Masyarakat	82.875.000	
QDD.001	Pangan yang Terdistribusi	1.000.000.000	50	Klp Masyarakat	19.500.000	0
QDD.002	Gerakan Pangan Murah yang dilaksanakan	2.750.000.000	1	Klp Masyarakat	53.625.000	0
QDD.003	Kios Pangan yang dikembangkan	500.000.000	1	Klp Masyarakat	9.750.000	
QMA	Data dan Informasi Publik	21.856.651.000	17	layanan, dokumen,	426.204.695	
QMA.001	Data dan Informasi Ketersediaan Pangan	5.486.346.000	4	Data	106.983.747	
QMA.002	Data dan Informasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	15.370.305.000	12	Data	299.720.948	
QMA.003	Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan	1.000.000.000	1	Data	19.500.000	
RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	10.000.000.000	7	Unit	195.000.000	0
RAG.001	Sarana Logistik Pangan	7.000.000.000	4	Unit	136.500.000	0
RAG.002	Sarana Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	3.000.000.000	3	Unit	58.500.000	0
HA.6876	Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	53.577.000.000			1.044.751.500	
AEA	Koordinasi	11.013.800.000	2	Kegiatan	214.769.100	0

URAIAN		PAGU NON BLOKIR			TARGET BULAN FEBRUARI	
		ANGGARAN (Rp)		FISIK	ANGGARAN (1,95%)	FISIK
AEA.001	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengendalian Kerawanan Pangan	3.981.760.000	1	Rekomendasi	77.644.320	
AEA.003	Koordinasi, Sosialisasi, Koordinasi mendukung Penyelamatan Pangan	7.032.040.000	1	Kegiatan	137.124.780	0
AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	400.000.000	4	NSPK	7.800.000	0
AFA.001	NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan	400.000.000	4	NSPK	7.800.000	0
PAD	Peraturan Presiden	440.000.000	1	R.Perpres	8.580.000	0
PAD.001	RPerpres Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelamatan Susut dan Sisa Pangan (SSP)	440.000.000	1	R.Perpres	8.580.000	0
PBR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	6.310.259.000	6	Rekomendasi	123.050.051	0
PBR.001	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan	1.600.000.000	1	Rekomendasi	31.200.000	0
PBR.004	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan	4.710.259.000	5	Rekomendasi	91.850.051	
QEC	Bantuan Produk	18.983.200.000	66744	Paket	370.172.400	
QEC.001	Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian kerawanan pangan	18.400.000.000	64800	Paket	358.800.000	0
QEC.103	Bantuan Pangan terfortifikasi dan Biofortifikasi	583,200,000	1944	Paket	11.372.400	0
QMA	Data dan Informasi Publik	8.888.143.000	3	Data	173.318.789	0
QMA.001	Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan	1.000.000.000	1	Data	19.500.000	0

URAIAN		PAGU NON BLOKIR			TARGET BULAN FEBRUARI	
		ANGGARAN (Rp)	FISIK		ANGGARAN (1,95%)	FISIK
QMA.003	Data dan Informasi Penyelamatan Pangan	7.000.000.000	1	Data	136.500.000	0
QMA.004	Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan	888.143.000	1	Data	17.318.789	
RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	7.541.59.,000	10	Unit	147.061.161	
RAG 001	Sarana prasarana upaya penyelamatan pangan	7.541.598.000	10	Unit	147.061.161	
HA.6877	Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	40.284.839.000			785.554.361	
ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	1.243.760.000	9	Rekomendasi	24.253.320	2
ABR.002	Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan	1.243.760.000	9	Rekomendasi	24.253.320	0
AEA	Koordinasi	17.349.130.000	22	Kegiatan	338.308.035	
AEA.001	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	7.860.000.000	10	Kegiatan	153.270.000	0
AEA.002	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	4.628.480.000	9	Kegiatan	90.255.360	0
AEA.003	Koordinasi, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	4.860.650.000	3	Kegiatan	94.782.675	
AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1.900.000.000	11	NSPK	37.050.000	
AFA.001	NSPK Penganekaragaman Konsumsi Pangan	600.000.000	3	NSPK	11.700.000	

URAIAN		PAGU NON BLOKIR			TARGET BULAN FEBRUARI	
		ANGGARAN (Rp)		FISIK	ANGGARAN (1,95%)	FISIK
AFA.002	NSPK Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan	1.000.000.000	5	NSPK	19.500.000	
AFA.003	NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	300.000.000	3	NSPK	5.850.000	
BDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	2.000.000.000	10	UMKM	39.000.000	
BDG 001	UMKM pangan lokal yang terfasilitasi penganekaragaman pangan	2.000.000.000	10	UMKM	39.000.000	
PCA	Perizinan Produk	2.500.000.000	500	Produk	48.750.000	
PCA.001	Sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	2.500.000.000	500	Produk	48.750.000	0
PEH	Promosi	3.500.000.000	1	Kegiatan	68.250.000	0
PEH.001	Promosi Pangan B2SA	3.500.000.000	1	Kegiatan	68.250.000	0
QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	2.404.489.000	23	Lembaga	46.887.536	0
QDB 001	Fasilitasi dan Pembinaan Pasar Pangan Segar Aman	904.729.,000	1	Lembaga	17.642.216	
QDB 002	Otoritas Kompeten Keamanan Pangan yang dibina	1.499.760.000	22	Lembaga	29.245.320	
QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	684.460.000	1	Klp Masyarakat	13.346.970	
QDD.001	Kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganekaragaman pangan	684.460.000	1	Klp Masyarakat	13.346.970	0
QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	2.998.000.000	1	Laporan	58.461.000	0
QIA.002	Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	2.998.000.000	1	Laporan	58.461.000	0

URAIAN		PAGU NON BLOKIR			TARGET BULAN FEBRUARI	
		ANGGARAN (Rp)	FISIK		ANGGARAN (1,95%)	FISIK
QMA	Data dan Informasi Publik	1.500.000.000	1	Data	29.250.000	0
QMA.001	Data Situasi Konsumsi Pangan	1.500.000.000	1	Data	29.250.000	0
RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	4.205.000.000	4	nit	81.997.500	0
RAG.001	Sarana Keamanan dan Mutu Pangan	4.205.000.000	4	Unit	81.997.500	0
WA	Program Dukungan Manajemen	117.063.827.000			2.282.744.627	0
WA.6874	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	117.063.827.000			2.282.744.627	0
AEC	Kerja sama	1.224.972.000	1	Dokumen	23.886.954	1
AEC.001	Kerja Sama Bidang Pangan	1.224.972.000	1	Dokumen	23.886.954	1
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	94,699,016,000	15	Layanan	1.846.630.812	6
EBA.956	Layanan BMN	525.011.000	4	Layanan	10.237.715	4
EBA.957	Layanan Hukum	1.141.900.000	1	Layanan	22.267.050	1
EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	2.899.500.000	6	Layanan	56.540.250	6
EBA.959	Layanan Protokoler	792.600.000	1	Layanan	15.455.700	1
EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.934.000.000	1	Layanan	37.713.000	0
EBA.962	Layanan Umum	8.348.720.000	1	Layanan	162.800.040	0
EBA.994	Layanan Perkantoran	79.057.285.000	1	Layanan	1.541.617.058	0
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	2.313.304.000	81	Unit	45.109.428	0
EBB.951	Layanan Sarana Internal	2.313.304.000	81	Unit	45.109.428	0
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	1.887.686.000	396	Orang	36.809.877	0
EBC.954	Layanan Manajemen SDM	1.887.686.000	396	Orang	36.809.877	0
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	12.328.986.000	40	Dokumen	240.415.227	0

URAIAN			PAGU NON BLOKIR			TARGET BULAN FEBRUARI	
			ANGGARAN (Rp)	FISIK		ANGGARAN (1,95%)	FISIK
	EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	6.129.682.000	12	Dokumen	119.528.799	0
	EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.000.000.000	3	Dokumen	19.500.000	1
	EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1.945.500.000	1	Dokumen	37.937.250	0
	EBD.965	Layanan Audit Internal	3.253.804.000	24	Laporan	63.449.178	1
	PAD	Peraturan Presiden	440.000.000	1	Rperpres	8.580.000	
	PAD 001	RPerpres tentang Rencana Pangan Nasional	440.000.000	1	Rperpres	8.580.000	
	QMA	Data dan Informasi Publik	3.669.863.000	1	Layanan	71.562.329	
	QMA 001	Data dan Informasi Pangan	3.669.863.000	1	Layanan	71.562.329	
	UAB	Sistem Informasi Pemerintahan	500.000.000	1	Sistem Informasi	9.750.000	
	UAB 001	Sistem Informasi Pangan dan Gizi	500.000.000	1	Sistem Informasi	9.750.000	

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Realisasi Fisik dan Keuangan

Sesuai dengan DIPA Induk Badan Pangan Nasional Tahun 2025, Badan Pangan Nasional akan melaksanakan 4 (empat) kegiatan yang terdiri dari 63 output/RO dengan pagu anggaran sebesar Rp. 329.957.285.000,- untuk mendukung capaian kinerja Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen. Realisasi keuangan pada bulan Februari Tahun 2025 diperoleh dari aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kementerian Keuangan. Realisasi keuangan disajikan per belanja dan per kegiatan lingkup Badan Pangan Nasional sebagaimana tabel 3 berikut:

Tabel 3.

Realisasi Keuangan Per Jenis Belanja Lingkup Badan Pangan Nasional Periode Bulan Februari Tahun 2025

NO	JENIS BELANJA	PAGU TOTAL (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	Belanja Pegawai	62.254.305.000	5.403.552.435	8,68
2.	Belanja Barang	202.518.846.000	4.574.192.663	2,26
3.	Belanja Modal	10.945.304.000	0	0,00
TOTAL		275.718.455.000	9.997.745.098	3,62

Realisasi Fisik dan Keuangan Bulan Februari Tahun 2025 untuk satuan kerja Badan Pangan Nasional sebagaimana disajikan pada tabel 4 berikut

Tabel 4.

Realisasi Fisik dan Keuangan Bulan Februari Tahun 2025 Per Output dan Komponen Satker Badan Pangan Nasional

URAIAN		TARGET BULAN JANUARI		REALISASI BULAN FEBRUARI	
		KEUANGAN (Rp)	FISIK	KEUANGAN (5,52%)	FISIK
JUMLAH SELURUHNYA		5.376.509.873		9.977.745.098	185,58
HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	3.093.765.246		1.571.560.858	50,80
HA.6875	Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1.263.459.386		1.362.629.280	107,85
AEA	Koordinasi	314.016.944	8 Kegiatan	949.651.941	302,42

URAIAN		TARGET BULAN JANUARI			REALISASI BULAN FEBRUARI		
		KEUANGAN (Rp)	FISIK		KEUANGAN (5,52%)	FISIK	
AEA.001	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan	63.031.098	6	Kegiatan	111.608.069	177,07	0
AEA.002	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan SPHP	41.104.421	1	Kegiatan	249.861.165	697,87	0
AEA.003	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan DCP	209.881.425	1	Kegiatan	588.182.707	280,25	0
AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	69.254.250	30	NSPK	18.500.000	26,71	0
AFA.001	NSPK Ketersediaan Pangan	11.700.000	6	NSPK	0	0,00	0
AFA.002	NSPK Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	18.554.250	10	NSPK	18.500.000	99,71	0
AFA.003	NSPK Distribusi dan Cadangan Pangan	39.000.000	14	NSPK	0	0,00	0
PBR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	176.108.498	20	Rekomendasi	240.536.882	136,58	
PBR 001	Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan	36.098.498	2		24.059.540	66,65	0
PBR 002	Rekomendasi Kebijakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	62.010.000	12		216.477.342	349,10	0
PBR 003	Rekomendasi Kebijakan Distribusi dan Cadangan Pangan	78.000.000	6	Rekomendasi Kebijakan	0	0,00	0
QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	82.875.000	52	Klp Masyarakat	37.800.000	45,61	0
QDD.001	Pangan yang Terdistribusi	19.500.000	50	Klp Masyarakat	0	0,00	0

URAIAN		TARGET BULAN JANUARI			REALISASI BULAN FEBRUARI		
		KEUANGAN (Rp)	FISIK		KEUANGAN (5,52%)		FISIK
QDD.002	Gerakan Pangan Murah yang dilaksanakan	53.625.000	1	Klp Masyarakat	15.000.000	27,97	0
QDD.003	Kios Pangan yang dikembangkan	9.750.000	1	Klp Masyarakat	22.800.000	233,85	0
QMA	Data dan Informasi Publik	426.204.695	17	layanan, dokumen,	116.140.457	27,25	0
QMA.001	Data dan Informasi Ketersediaan Pangan	106.983.747	4	Data	23.770.663	22,22	0
QMA.002	Data dan Informasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	299.720.948	12	Data	92.369.794	30,82	0
QMA.003	Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan	19.500.000	1	Data	0	0,00	0
RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	195.000.000	7	Unit	0	0,00	0
RAG.001	Sarana Logistik Pangan	136.500.000	4	Unit	0	0,00	0
RAG.002	Sarana Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	58.500.000	3	Unit	0	0,00	0
HA.6876	Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1.044.751.500			0	0,00	
AEA	Koordinasi	214.769.100	2	Kegiatan	0	0,00	0
AEA.001	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengendalian Kerawanan Pangan	77.644.320	1	Rekomendasi	0	0,00	0

URAIAN		TARGET BULAN JANUARI			REALISASI BULAN FEBRUARI		
		KEUANGAN (Rp)	FISIK		KEUANGAN (5,52%)		FISIK
AEA.003	Koordinasi, Sosialisasi, Koordinasi mendukung Penyelamatan Pangan	137.124.780	1	Kegiatan	0	0,00	0
AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	7.800.000	4	NSPK	0	0,00	0
AFA.001	NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan	7.800.000	4	NSPK	0	0,00	0
PAD	Peraturan Presiden	8.580.000	1	R.Perpres	0	0,00	0
PAD.001	RPerpres Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelamatan Susut dan Sisa Pangan (SSP)	8.580.000	1	R.Perpres	0	0,00	0
PBR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	123.050.051	6	Rekomendasi	0	0,00	0
PBR.001	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan	31.200.000	1	Rekomendasi	0	0,00	0
PBR.004	Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan	91.850.051	5	Rekomendasi	0	0,00	0
QEC	Bantuan Produk	370.172.400	66744	Paket	0	0,00	0
QEC.001	Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian kerawanan pangan	358.800.000	64800	Paket	0	0,00	0
QEC.103	Bantuan Pangan terfortifikasi dan Biofortifikasi	11.372.400	1944	Paket	0	000	0
QMA	Data dan Informasi Publik	173.318.789	3	Data	0	0,00	0
QMA.001	Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan	19.500.000	1	Data	0	0,00	0

URAIAN		TARGET BULAN JANUARI			REALISASI BULAN FEBRUARI		
		KEUANGAN (Rp)	FISIK		KEUANGAN (5,52%)		FISIK
QMA.003	Data dan Informasi Penyelamatan Pangan	136.500.000	1	Data	0	0,00	0
QMA.004	Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan	17.318.789	1	Data	0	0,00	0
RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	147.061.161	10	Unit	0	0,00	0
RAG 001	Sarana prasarana upaya penyelamatan pangan	147.061.161	10	Unit	0	0,00	0
HA.6877	Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	785.554.361			208.931.578	26,60	0
ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	24.253.320	9	Rekomendasi	0	0,00	0
ABR.002	Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan	24.253.320	9	Rekomendasi	0	0,00	0
AEA	Koordinasi	338.308.035	22	Kegiatan	94.206.622	27,85	0
AEA.001	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	153.270.000	10	Kegiatan	44.571.574	29,08	0
AEA.002	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	90.255.360	9	Kegiatan	6.115.180	6,78	0
AEA.003	Koordinasi, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar	94.782.675	3	Kegiatan	43.519.868	45,92	0

URAIAN		TARGET BULAN JANUARI			REALISASI BULAN FEBRUARI		
		KEUANGAN (Rp)		FISIK	KEUANGAN (5,52%)	FISIK	
	Keamanan dan Mutu Pangan						
AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	37.050.000	11	NSPK	46.619.345	125,83	0
AFA.001	NSPK Penganekaragaman Konsumsi Pangan	11.700.000	3	NSPK	46.619.345	398,46	0
AFA.002	NSPK Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan	19.500.000	5	NSPK	0	0,00	0
AFA.003	NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	5.850.000	3	NSPK	0	0,00	0
BDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	39.000.000	10	UMKM	0	0,00	0
BDG 001	UMKM pangan lokal yang terfasilitasi penganekaragaman pangan	39.000.000	10	UMKM	0	0,00	0
PCA	Perizinan Produk	48.750.000	500	Produk	11.728.500	24,06	0
PCA.001	Sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	48.750.000	500	Produk	11.728.500	24,06	0
PEH	Promosi	68.250.000	1	Kegiatan	34.095.005	49,96	0
PEH.001	Promosi Pangan B2SA	68.250.000	1	Kegiatan	34.095.005	49,96	0
QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	46.887.536	23	Lembaga	12.490.106	26,64	0
QDB 001	Fasilitasi dan Pembinaan Pasar Pangan Segar Aman	17.642.216	1	Lembaga	12.490.106	70,80	0

URAIAN		TARGET BULAN JANUARI			REALISASI BULAN FEBRUARI		
		KEUANGAN (Rp)		FISIK	KEUANGAN (5,52%)		FISIK
QDB 002	Otoritas Kompeten Keamanan Pangan yang dibina	29.245.320	22	Lembaga	0	0,00	0
QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	13.346.970	1	Klp Masyarakat	0	0,00	0
QDD.001	Kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganeekaragaman pangan	13.346.970	1	Klp Masyarakat	0	0,00	0
QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	58.461.000	1	Laporan	9.792.000	16,75	0
QIA.002	Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	58.461.000	1	Laporan	9.792.000	16,75	0
QMA	Data dan Informasi Publik	29.250.000	1	Data	0	0,00	0
QMA.001	Data Situasi Konsumsi Pangan	29.250.000	1	Data	0	0,00	0
RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	81.997.500	4	Unit	0	0,00	0
RAG.001	Sarana Keamanan dan Mutu Pangan	81.997.500	4	Unit	0	0,00	0
WA	Program Dukungan Manajemen	2.282.744.627			8.406.184.240	368,25	0
WA.6874	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	2.282.744.627			8.406.184.240	368,25	0
AEC	Kerja sama	23.886.954	1	Dokumen	1.458.000	6,10	0
AEC.001	Kerja Sama Bidang Pangan	23.886.954	1	Dokumen	1.458.000	6,10	0
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1.846.630.812	15	Layanan	7.342.152.084	397,60	15

URAIAN		TARGET BULAN JANUARI			REALISASI BULAN FEBRUARI		
		KEUANGAN (Rp)	FISIK		KEUANGAN (5,52%)		FISIK
EBA.956	Layanan BMN	10.237.715	4	Layanan	45.580.000	445,22	1
EBA.957	Layanan Hukum	22.267.050	1	Layanan	11.185.000	50,23	1
EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	56.540.250	6	Layanan	115.821.815	204,85	6
EBA.959	Layanan Protokoler	15.455.700	1	Layanan	113.039.052	731,37	1
EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	37.713.000	1	Layanan	24.258.000	64,32	1
EBA.962	Layanan Umum	162.800.040	1	Layanan	413.319.652	253,88	1
EBA.994	Layanan Perkantoran	1.541.617.058	1	Layanan	6.618.948.565	429,35	1
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	45.109.428	81	Unit	0	0,00	0
EBB.951	Layanan Sarana Internal	45.109.428	81	Unit	0	0,00	0
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	36.809.877	396	Orang	15.187.500	41,26	0
EBC.954	Layanan Manajemen SDM	36.809.877	396	Orang	15.187.500	41,26	0
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	240.415.227	40	Dokumen	802.896.044	333,96	0
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	119.528.799	12	Dokumen	85.935.593	71,90	1
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	19.500.000	3	Dokumen	32.379.267	166,05	0
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	37.937.250	1	Dokumen	265.652.900	700,24	0
EBD.965	Layanan Audit Internal	63.449.178	24	Laporan	418.928.284	660,28	1
PAD	Peraturan Presiden	8.580.000	1	Rperpres	0	0,00	0
PAD 001	RPerpres tentang Rencana Pangan	8.580.000	1	Rperpres	0	0,00	0

URAIAN		TARGET BULAN JANUARI			REALISASI BULAN FEBRUARI		
		KEUANGAN (Rp)		FISIK	KEUANGAN (5,52%)		FISIK
	Nasional						
QMA	Data dan Informasi Publik	71.562.329	1	Layanan	219.035.125	306,08	1
QMA 001	Data dan Informasi Pangan	71.562.329	1	Layanan	219.035.125	306,08	1
UAB	Sistem Informasi Pemerintahan	9.750.000	1	Sistem Informasi	25.455.487	261,08	0
UAB 001	Sistem Informasi Pangan dan Gizi	9.750.000	1	Sistem Informasi	25.455.487	261,08	0

Berdasarkan realisasi fisik dan keuangan pada output/RO dan komponen lingkup Badan Pangan Nasional posisi bulan Februari Tahun 2025 sebagaimana tabel di atas, realisasi anggaran per bulan Februari Tahun 2025 berdasarkan aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan mencapai Rp. 9.977.745.098,- atau 6,29% dari alokasi anggaran satker Badan Pangan Nasional Tahun 2025 sebesar Rp.275.718.455.000,- Sedangkan jika dibandingkan dengan target bulan Februari Tahun 2025 sebesar 1,95% atau setara Rp.5.376.509.873,- realisasi mencapai 185,58%, hal ini terjadi karena pencairan anggaran sebagian besar mulai di bulan Februari. Realisasi keuangan rincian per kegiatan sebagaimana tabel 5 berikut.

Tabel 5.
Realisasi Keuangan Bulan Februari Tahun 2025
Per Kegiatan Lingkup Badan Pangan Nasional

URAIAN		KEUANGAN BULAN JANUARI		
		TARGET	REALISASI	
JUMLAH SELURUHNYA		5.376.509.873	9.977.745.098	185,58%
HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	1.263.459.386	1.362.629.280	4,37%
HA.6875	Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	3.576.561.953	331.527.519	107,85%
HA.6876	Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1.044.751.500	0	0,00%
HA.6877	Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	785.554.361	208.931.578	26,60%
WA	Program Dukungan Manajemen	2.282.744.627	8.406.184.240	368,25%
WA.6874	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	2.282.744.627	8.406.184.240	368,25%

Dari tabel 5 di atas, realisasi keuangan tertinggi pada bulan Februari Tahun 2025 pada kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional sebesar 368,25%. Capaian tersebut untuk kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Internal, Layanan Manajemen Kinerja Internal dan Data dan Informasi Publik. Sedangkan realisasi terendah adalah kegiatan Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dengan realisasi sebesar 26,60%.

3.2 Monitoring Kegiatan Prioritas

Hasil monitoring kegiatan prioritas lingkup Badan Pangan Nasional selama bulan Februari Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan. Pada periode bulan Januari Tahun 2024, kegiatan prioritas yang tetap dilaksanakan bidang pada tahun ini sebagai berikut:

1.1 Direktorat Ketersediaan Pangan, dengan kegiatan sbb:

1. Laporan penugasan mendampingi kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR ke Provinsi Jawa Tengah, dengan hasil sbb:

- a. Kunjungan dilaksanakan menjelang bulan Ramadhan ke Lokasi Pasar Johar Semarang untuk ketersediaan pangan masih aman, selain itu dilakukan pengujian keamanan pangan segar dengan beberapa sampel komoditas pangan dengan menggunakan rapid test kit untuk memastikan bahan pangan yang dikonsumsi oleh Masyarakat aman. Selanjutnya kunjungan ke Bulog Palembang untuk mendiskusikan ketersediaan kebutuhan pangan pokok menjelang bulan Ramadhan dengan melibatkan stakeholder terkait.
- b. Pertemuan updating proyeksi neraca pangan bulan Februari 2025 dengan melibatkan semua pihak terkait dengan menyepakati proyeksi neraca pangan sebagai pijakan awal untuk menetapkan kebijakan ketersediaan pangan. Untuk updating proyeksi neraca pangan bulan Februari 2025 dalam kondisi aman untuk semua komoditas, potensi produksi Januari-Maret 2025 berdasarkan KSA BPS dan April-Desember 2025 berdasarkan rencana produksi Ditjen Tanaman Pangan Kementan akan tindak lanjut Badan Pangan Nasional akan mengirimkan hasil updating proyeksi neraca pangan bulan Februari 2025 kepada Kementerian/Lembaga terkait.
- c. Pemantauan ketersediaan stok daging sapi/kerbau di BUMN pangan untuk memastikan ketersediaan stok daging sapi/kerbau impor penugasan BUMN menjelang HBKN tahun 2025. Stok daging kerbau yang terdapat di gudang cold storage PT. Suri Nusantara Jaya sebanyak 15.000 ton, dimana 5.000 ton milik PT Berdikari, 4.000 ton milik PT PPI dan sekitar 6.000 ton milik PT.

Suri dimana daging tersebut merupakan daging realisasi PI tahun 2024. Stok daging kerbau yang disiapkan untuk operasi pasar menjelang HBKN sebesar 9.000 ton. Rencana Tindak Lanjut: PT PPI dan PT Berdikari diharapkan melaporkan data realisasi impor dan distribusi daging dari D1 ke D2 dan D2 sampai tingkat pengecer.

- d. Pemantauan ketersediaan pangan di pelaku usaha Provinsi Jawa Barat yang bertujuan untuk memantau ketersediaan stok menjelang HBKN dan menghimpun data ketersediaan pangan di pelaku usaha melalui aplikasi pergudangan. Pemantauan dilaksanakan ke pelaku usaha bawang dan cabai, kunjungan daging lembu ke PT. Agro Boga Utama Bandung, dan Kunjungan daging ayam ke PT Charoen Pokphand Bandung. Untuk rencana tindak lanjut PT Agro Boga Utama Bandung, PT. CPI Bandung, PT. CPI Majalengka, PT. CPI Subang, CV. Boga Samitra, serta champion bawang dan cabai metah yang telah dikunjungi bersedia melakukan pelaporan stok setiap akhir bulan melalui aplikasi pergudangan.
- e. Rapat Koordinasi Tekns Monitoring realisasi impor gula dan daging lembu yang bertujuan untuk menindaklanjuti amanat Rapat Koordinasi Terbatas di Bidang Pangan tentang Evaluasi Implementasi NK Pangan Tahun 2025. Monitoring dilakukan untuk melihat realisasi impor komoditas gula dan daging lembu dalam rangka menjaga harga pada saat HBKN 2025. Rencana Tindak Lanjut: akan dilakukan rapat koordinasi monitoring realisasi impor gula dan daging lembu setiap minggunya.

1.2 Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, dengan kegiatan sbb:

A. Regulasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP)

1. Rapat Koordinasi Terbatas Menteri/Kepala Lembaga Bidang Pangan tentang Pemberlakuan HPP, Penyaluran Bantuan Pangan, dan Pelaksanaan SPHP, dengan hasil sbb:
 - a. Pemberlakuan HPP Gabah dan Beras Rp 6.500/kg mulai 15 Januari 2025;
 - b. Pemberlakuan HPP Jagung Rp 5.500/kg mulai 1 Februari 2025 saat masuk masa panen raya jagung;
 - c. Pemerintah melalui Perum BULOG akan menyerap gabah dan jagung petani yang tidak terserap pasar;
 - d. Bantuan Pangan Beras untuk 16juta keluarga penerima bantuan pangan ditambah 4 bulan, waktu akan dibahas dalam Ratas bersama Presiden RI;
 - e. Penyaluran SPHP Beras ditambah 1.500.000 ton, SPHP Jagung 250.000 ton, dan SPHP Kedelai 100.000 ton yang diprioritaskan di bulan-bulan defisit, waktu akan dibahas di Ratas bersama Presiden RI; dan

- f. CJP Jagung sebesar 750.000 ton disalurkan melalui pasar umum dengan mekanisme lelang harga terbaik.faruq
2. Rapat TL Reviu atas LHR Penyaluran CPP SPHP Jagung, dengan beberapa temuan berdasarkan LHR sbb:
 - a. Penyaluran kepada 14 koperasi yang tidak dilengkapi dokumen badan hukum dan NIB. Klasifikasi badan usaha dan NIB tidak sesuai dengan bidang peternakan (volume 32.152 ton atau Rp 23,92 miliar);
 - b. Peternak tidak sesuai kriteria yang dapat melakukan self mixing (volume 20 ton atau Rp 15,02 juta);
 - c. Praktik bagi rata dianggap oleh BPKP tidak sesuai dengan aturan (volume 3.040 ton atau Rp 1,98 miliar);
 - d. Peternak yang tidak terdaftar di SK Kementan;
 - e. Peternak menerima melebihi dari ketentuan yang disebabkan kelebihan pagu, keanggotaan ganda, nomor telepon identik, dan alamat identik (volume 875,24 ton atau Rp 620,18 juta).
 - f. Tindak Lanjut:
 - Bapanas akan bersurat kepada Dirjen PKH Kementan untuk permohonan dukungan kelengkapan data dan informasi terutama terkait dengan Badan Usaha NIB/KLBI asosiasi/koperasi yang menaungi peternak dalam proses teknis distribusi jagung serta penjelasan lengkap terkait kewajiban peternak untuk melakukan *self mixing*.
 - Bapanas akan bersurat kepada PINSAR Pusat untuk memberikan penjelasan tentang AD/ART, Badan Hukum, NIB/KLBI, dan lainnya yang mendukung bahwa PINSAR Daerah (Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara) merupakan bagian dari dan/atau naungan dari PINSAR Pusat.
 - Bapanas akan menyampaikan surat pemberitahuan dan teguran kepada peternak yang masuk dalam catatan yang melakukan praktik bagi rata dengan komposisi tertentu (Lampung 20%), serta adanya nama ganda, nomor telepon identik, dan alamat identik.
3. Rakor HPP Jagung, dengan hasil sbb:
 - a. Rapat koordinasi dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari hasil Rakortas Kemenko Bidang Pangan yang telah dilaksanakan tanggal 6 Januari 2025 terkait pemberlakuan HPP dan Rafaksi di tingkat petani.
 - b. Perwakilan Dirjen Tanaman Pangan, Kementan melaporkan berdasarkan data KSA BPS, panen jagung periode Januari – Februari 2025 naik sekitar 1,1 juta ton dibandingkan periode yang sama di tahun 2024. Panen raya jagung akan terjadi pada bulan Maret-April 2025, sehingga Perbadan HPP Jagung diharapkan sudah terbit sebelum panen raya untuk

melindungi petani. Selain itu, petani sulit menghasilkan Jagung Kering Pipil (JKP) dengan ka 14% sehingga diperlukan rafaksi untuk memudahkan BULOG dalam melakukan pembelian.

- c. Perwakilan Dirjen PKH Kementan menyampaikan terkait kelengkapan dan pembaharuan data peternak termasuk penambahan data NIK dan KK dengan melakukan verifikasi kembali yang lebih baik secara berjenjang dari dinas di daerah sampai Kementan. Selain itu, perlu dukungan dan rekomendasi dari dinas daerah terkait kebenaran data dari asosiasi/anggotanya yang akan untuk ditetapkan dalam SK Menteri Pertanian tentang BNBA penerima SPHP jagung. Populasi ternak diharapkan harus sesuai dengan kondisi riil di kandang.
- d. Ketua umum GPMT menyampaikan stok saat ini 1,2 juta ton (kebutuhan 48 hari). Usulan HPP Jagung: (a) HPP regional sentra peternak (Medan, Lampung, Jateng, Jatim, Makassar) dan non sentra peternak (Gorontalo dan NTB) dengan pengurangan untuk ongkos distribusi; b) Usulan rafaksi harga jagung dengan nilai konversi penurunan volume 1,5% yg terdiri dari 1,2% untuk setiap kenaikan 1% ka dan 0,3% susut, benda asing dan kotoran.
- e. Perwakilan Asosiasi/Koperasi/Peternak menyoroti standarisasi dan sensitivitas alat tester kadar air sehingga tidak ada perbedaan ka di petani, BULOG dan pedagang/pabrik pakan. Sertifikasi lulus uji tera perlu menjadi syarat untuk mitra BULOG. Selain itu implikasi terhadap harga di peternak perlu diseimbangkan melalui regulasi Harga jagung di tingkat peternak.
- f. Perwakilan Ombudsman RI menyampaikan usulan di dalam RPerbadan HPP dan rafaksi jagung terkait unsur-unsur partisipasi publik siapa saja yang terlibat. Selain itu, perlu adanya kalibrasi alat ukur kadar air setiap tahun sekali.
- g. Perwakilan BULOG menyampaikan terkait dengan lokasi penetapan harga agar memperhatikan biaya lain-lain hingga adanya penentuan harga gudang BULOG, standar kualitas yang terkait dengan sarpras yang dimiliki oleh BULOG, dan pengukuran kadar air dengan alat yang sudah ditera.
- h. Perwakilan BPS menyampaikan catatan terkait KSA, dimana hasil KSA masih angka sementara (amatan November) untuk amatan desember akan disampaikan 20 Januari 2025, maka produktivitas untuk September-Desember 2024 masih menggunakan angka 5 tahun ke belakang (2019 – 2023).
- i. Perwakilan Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu menyampaikan pemberlakuan HPP di tingkat petani dapat

meningkatkan motivasi petani untuk menanam jagung. Selain itu, perhitungan dampak kenaikan harga jagung terhadap inflasi akan disimulasikan menyusul oleh tim BKF.

- j. Perwakilan Sesdukab menyampaikan HPP Jagung sama seperti HPP Gabah ada di petani dan gudang BULOG. Perlu konsultasi ke Kemenkumham terkait pengaturan melalui Perbadan atau cukup dengan SK Kabadan.
- k. Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan, KSP menyampaikan bahwa pemberlakuan HPP ditujukan untuk mengatur harga pembelian oleh pemerintah c.q. Badan Pangan Nasional melalui Perum BULOG. Namun, dalam pembuatan regulasi tersebut supaya dibuat lebih komprehensif untuk memitigasi hal-hal teknis yang belum termuat di dalam RPerbadan, seperti kapasitas gudang dan mesin *dryer* yang dimiliki BULOG yang terbatas dan akibatnya terhadap kualitas jagung.
- l. Deputi KSP Bapanas menyampaikan perlu penyesuaian Juknis SPHP Jagung terkait keakuratan data peternak. Selain itu, pemberlakuan HPP dan rafaksi jagung akan berlaku untuk pembelian pemerintah, berapapun produksi petani maka akan diserap BULOG, namun mempertimbangkan mekanisme perdagangan secara normal, maka harus ada antisipasi untuk menjaga stabilisasi harga baik di petani maupun di peternak. Oleh sebab itu, momentum ini merupakan kesempatan BULOG bertransformasi untuk membenahan kapabilitas infrastruktur dan SDM, sehingga mendapat harga yang wajar, untuk CPP produksi dalam negeri.
- m. Tindak Lanjut:
 - Konsultasi kemenkumham terkait penetapan HPP dan Rafaksi jagung melalui Perbadan atau SK Kabadan.
 - Finalisasi perhitungan rafaksi harga jagung.
 - Finalisasi pembahasan draf Perbadan/Keputusan Ka Badan tentang HPP dan Rafaksi Harga Jagung.
 - Pembahasan dan penetapan regulasi terkait seperti Juknis pengadaan CJP (Pengelolaan CJP) dan Juknis SPHP Jagung serta Juknis penyaluran CJP melalui mekanisme komersial.
4. Rapat Koordinasi Teknis Pembahasan Distribusi Jagung Nasional
 - a. Rakornis membahas sistem distribusi jagung dalam rangka persiapan panen raya yang akan segera terjadi di NTB.
 - b. Panen raya di NTB diproyeksikan pada bulan Februari, Maret, dan April. Beberapa kendala yaitu gudang di NTB tidak mampu menampung dan terjadi antrian ekspedisi sehingga jagung banyak yang terlambat disalurkan. Selain itu para

- penyedia jasa logistik menetapkan tarif sendiri sehingga terjadi kenaikan biaya transportasi.
- c. Selain itu saat ini masih terdapat sisa stock jagung di gudang BULOG NTB sebesar 51 ton dan relatif tidak bergerak. Hal ini dikarenakan harga di pasar saat ini Rp 5.300-5.500/kg sehingga harga yang ditawarkan pemerintah sebesar Rp 5.500/kg belum bisa menjadi daya tarik.
 - d. Distribusi jagung di NTB dipengaruhi infrastruktur transportasi, selain itu dikarenakan tidak terdapat pabrik pakan, sehingga disarankan adanya perbaikan infrastruktur transportasi serta subsidi transport.
 - e. BULOG juga diharapkan segera melakukan distribusi agar dapat mengurangi ruang penyimpanan di gudang BULOG yang terbatas dan tidak terjadi penumpukan di gudang BULOG.
 - f. Selain itu perlu memperhatikan *handling* pascapanen agar kualitas jagung sesuai.
 - g. Tindak lanjut:
 - Perlu memetakan gudang-gudang yang ada sehingga penyimpanan di gudang dapat dimaksimalkan dan tepat sasaran.
 - Perlu menyiapkan alternatif pergudangan selain dari gudang BULOG atau mitra BULOG.
 - Perlu memperhatikan teknologi pascapanen jagung agar kualitas jagung sesuai dengan spesifikasi.
 - Perlu perbaikan tata kelola distribusi antrian di Pelabuhan agar penyaluran bisa lebih maksimal.
 - Akan dilakukan rapat lanjutan di tingkat atas serta kunjungan ke NTB secara langsung.
5. Rakor SPHP Cabai, untuk perkembangan harga cabai khususnya cabai rawit merah (CRM) dan cabai merah keriting (CMK) yang terus meningkat dan sebagian di atas HAP baik di tingkat produsen dan/atau konsumen serta menindaklanjuti surat Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Nomor: D-10/RC.310/D.4/01/2025 tanggal 6 Januari 2025 perihal perkembangan harga cabai, ada kenaikan harga CRM dan CMK yang melewati harga acuan penjualan di Tingkat konsumen karena adanya penurunan pasokan CRM dan CMK yang disebabkan adanya gangguan di sisi produksi sebagai akibat cuaca ekstrim di berbagai wilayah sentra cabai yang berlangsung selama 1 bulan,
- Rekomendasi Tindak Lanjut:
- a. Melakukan koordinasi dengan para petani champion cabai Indonesia

- b. Petani Champion Cabai Indonesia akan meningkatkan koordinasi dengan Pemda untuk penyediaan cabai dengan harga yang lebih murah untuk konsumen langsung.
 - c. Bapanas akan mengamati perkembangan harga cabai satu minggu ke depan dan akan mempersiapkan aksi seperti fasilitasi distribusi pangan (FDP) dan penjualan cabai di lokasi Gerakan Pangan Murah (GPM) apabila harga konsisten naik.
6. Sosialisasi dan Pembahasan Perubahan HPP Gabah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras, dengan hasil sbb:
- a. Pembahasan terkait revidi HPP Gabah dan Beras sebelumnya telah dilakukan beberapa kali dengan melibatkan K/L dan Asosiasi/pelaku usaha perberasan. Usulan harga GKP tingkat petani berdasarkan hasil rapat koordinasi pada bulan Desember 2024 rata-rata Rp 6.500 – 7.000/kg.
 - b. Melalui pembaruan kebijakan HPP Gabah dan Beras diharapkan kesejahteraan petani meningkat sehingga mendorong minat petani untuk meningkatkan produksinya.
 - c. Bentuk regulasi perubahan HPP Gabah dan Beras saat ini dapat berupa Keputusan Kepala Badan dan tidak harus Peraturan Badan, karena sebelumnya sudah diatur dalam Perbadan Nomor 4 Tahun 2024.
 - d. Perubahan kebijakan HPP didasarkan dari beberapa hal salah satunya struktur ongkos. Usulan HPP Rp 6.500/kg searah dengan kondisi aktual di lapangan dan sesuai usulan BPS. Kebijakan HPP perlu pertimbangan dan kehati-hatian karena beras berdampak langsung pada inflasi dan juga sebagian petani juga merupakan konsumen beras. HPP Rp 6.500/kg cukup moderat untuk mengakomodir peningkatan kesejahteraan petani dan di sisi lain inflasi di konsumen masih dapat dijaga.
 - e. Pemberlakuan HPP Gabah dan Beras yang baru sangat tepat waktunya sebelum panen raya sehingga pelaku usaha dapat mempersiapkan dengan baik perubahan tersebut seperti kesiapan modal dan lainnya. Pemerintah dan asosiasi/pelaku usaha harus menyiapkan strategi agar kenaikan HPP dapat benar-benar dinikmati manfaatnya oleh petani. Diharapkan rendemen beras yang dihasilkan petani bisa lebih besar 56% dengan HPP Rp 6.500/kg agar penggilingan tidak merugikan dan harga beras di gudang Bulog sesuai HET Rp 12.500/kg. Perpadu akan menjalin kerjasama dengan BULOG dalam penyerapan gabah.
 - f. Kenaikan HPP dan mensosialisasikan kepada seluruh anggota. Kedepan perlu ada upaya bersama untuk melakukan efisiensi rantai pasok beras karena saat ini banyak middle man. Penetapan harga Rp 6.500/kg perlu diikuti kesiapan

kemampuan dan kapasitas kelembagaan penyerapnya (BULOG). Kolaborasi pelaku usaha petani, penggilingan, dan Perum BULOG termasuk akses kredit untuk permodalan. Selain itu, pendistribusian alokasi pupuk khususnya untuk CPCL perlu dioptimalkan dengan pendekatan berbasis peta lahan.

- g. Harus mrrmpertimbangkan kembali terkait penetapan kualitas gabah karena kadar hampa 10% untuk HPP GKP Rp 6.500/kg terlalu tinggi, dan akan sulit untuk menghasilkan beras dengan harga Rp 12.000/kg. Diusulkan kadar hampa maksimal 3-5% sehingga rendemen beras dapat lebih besar 56%.
 - h. Penerbitan HPP sebelum panen raya sudah tepat. Peningkatan HPP merupakan salah satu instrumen untuk menuju kemandirian pangan sesuai arahan Presiden. Terkait kadar hampa, saat ini di petani berkisar 5 – 10%. Kadar hampa tersebut dipengaruhi kualitas gabah dan mekanisasi pertanian. Jika menggunakan mesin Combine kadar hampa 2 – 5%, mesin tracer 5 – 10%. Selain itu terkait butir patah sebesar 20% perlu dipertimbangkan kembali. Ada kekhawatiran jika harga beras Rp 12.000/kg maka harga beli GKP di bawah HPP. Perlunya Pengawasan implementasi penyesuaian HPP beras.
 - i. Penetapan HPP agar dapat diimplementasikan dengan baik perlu disiapkan oleh Pemerintah dan Perum BULOG mengingat saat ini serapan gabah oleh BULOG belum optimal. Hal yang perlu diantisipasi adalah saat ada keterbatasan serapan penggilingan dan serapan BULOG tidak optimal maka dapat membuat harga di petani jatuh.
 - j. Tindak Lanjut:
 - Perhitungan Rafaksi GKP terkait kadar hampa dari Kementerian Pertanian, BRIN dan pelaku usaha yang dapat menjadi pertimbangan pada reuiu HPP Gabah dan Beras berikutnya;
 - Proses penetapan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional tentang HPP dan Rafaksi Gabah dan Beras.
7. Sosialisasi Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras Tingkat Konsumen 2025, sbb:
- a. Tahun 2025 Perum BULOG dalam penyaluran beras SPHP harus memperhatikan perkembangan harga komoditas beras pada Panel Harga Pangan khususnya wilayah Timur dan daerah 3TP yang di atas HET (warna merah pada peta Panel Harga Pangan) agar dilakukan penetrasi pasar dengan menambah volume penyaluran.
 - b. Dalam rangka mempercepat pelaksanaan penyaluran beras SPHP, Perum BULOG berkolaborasi dengan Dinas Pangan

provinsi/kabupaten/kota agar berkolaborasi dengan OPD lainnya untuk melakukan verifikasi dan validasi data mitra penyaluran beras SPHP 2025 serta melaksanakan penguatan intervensi SPHP Beras untuk memastikan penyaluran beras SPHP sudah sesuai dengan regulasi yang ada.

- c. Pengadaan dan penyaluran SPHP Beras harus tepat waktu, tepat harga dan tepat lokasi mengingat implementasi regulasi HET Beras tidak mudah diterapkan di semua wilayah.
- d. Pelaku usaha pangan berkomitmen mendukung pelaksanaan penyaluran SPHP beras 2025 baik di pengecer maupun retail modern sesuai regulasi yang berlaku.
- e. Tindak lanjut:
 - Januari minggu ketiga akan dilaksanakan monev bersama terkait penyaluran beras SPHP di wilayah Timur melibatkan K/L dan Pemda (Gubernur, Walikota, Bupati).
 - Badan Pangan Nasional akan menyiapkan SK Tim Monev dengan melampirkan titik lokasi dengan mengacu pada informasi perkembangan harga beras pada panel harga pangan.

8. Rakor Tindak Lanjut Kepbadan HPP Gabah dan Beras, dengan hasil sbb:

- a. Berdasarkan Informasi yang dihimpun, data dan informasi panel harga pangan dan informasi lainnya terkait kondisi perkembangan harga gabah/beras di tingkat petani, sehingga perlu disamakan persepsi untuk mengupdate sekaligus upaya mitigasi harga gabah/beras jangan sampai jatuh di petani.
- b. Mengacu pada Kepbadan Nomor 2 Tahun 2025 tentang perubahan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah/beras dan rafaksi beras yang mengatur antara lain: kadar air, kadar hampa, derajat sosoh, butir patah (broken) dan lainnya, sampai saat ini belum dapat dipenuhi petani. Oleh karena itu perlu pemberlakuan rafaksi gabah untuk dapat menyerap gabah petani.
- c. Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari Panel Harga Pangan, beberapa daerah/wilayah dengan harga gabah di bawah HPP (42 kab/kota) dengan variasi sebaran yang sangat beragam. Dinas pangan provinsi/kabupaten/kota agar melakukan konfirmasi data dengan enumerator panel harga pangan di wilayah/lokasi dimaksud untuk menyamakan persepsi penyebab harga gabah dibawah HPP antara lain: jenis, volume, lokasi, kondisi/kualitas gabah, dan hal lainnya.
- d. Tindak Lanjut:
 - Data dan informasi dari Dirjen, TP Kementan akan disampaikan ke dinas pangan daerah untuk dilakukan

klarifikasi dan validasi dengan data dan informasi enumerator yang lebih detail;

- Dinas pangan provinsi/kabupaten/kota perlu melakukan sosialisasi Keppadan Nomor 2 Tahun 2025 terkait Perubahan HPP Gabah dan Beras ke Dinas, K/L, dan stakeholder terkait lainnya.
- Akan dilakukan rapat lanjutan untuk membahas dengan data yang lebih lengkap baik oleh dinas maupun berdasarkan data enumerator.

B. Panel Harga Pangan

1. Perkembangan Harga Pangan

Harga rata-rata nasional komoditi tingkat produsen pada Januari 2025 untuk komoditas yang aman yaitu Beras Medium tingkat penggilingan, Cabai Merah Keriting tingkat petani, dan cabai Rawit Merah tingkat petani. Komoditas yang berada pada status waspada yaitu Jagung Pipilan Kering tingkat peternak (4,86%<HAP), Bawang Merah (5,88%<HAP), Sapi (hidup) (7,24%>HAP), Ayam Ras (hidup) (8,56%<HAP), dan Telur Ayam Ras (6,45% < HAP). Komoditas yang termasuk intervensi yaitu GKP tingkat petani (1,86%<HPP), GKG tingkat penggilingan (5,63% < HPP), dan Kedelai Biji Kering (14,34%<HAP).

Berdasarkan perkembangan harga komoditas tingkat konsumen yang berada di atas HAP/HET pada M5 Januari 2025, dengan harga rata-rata berada di atas HAP/HET yang menunjukkan mengalami peningkatan pada M5 Januari 2025 terjadi pada komoditas Gula Konsumsi, Cabai Merah Keriting, Beras Premium, dan Beras Medium. Pantauan pada M5 Januari 2025, terdapat 256 Kab/Kota di Atas HET Beras Premium, terdapat 378 Kab/Kota di atas HET Beras Medium, terdapat 287 Kab/Kota di atas HAP Cabai Merah Keriting, dan terdapat 375 Kab/Kota di atas HAP Gula Konsumsi.

2. Bimbingan Teknis Aplikasi Baru Panel Harga Pangan

Bimbingan teknis aplikasi baru panel harga pangan dilaksanakan secara daring yang diikuti oleh seluruh petugas verifikator tingkat kab/kota dan petugas enumerator tingkat provinsi.

Kegiatan Bimbingan Teknis dilakukan dengan menjelaskan fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi baru Panel Harga Pangan dan menginventarisir kendala – kendala yang dihadapi oleh petugas verifikator dan enumerator, serta melakukan praktik penginputan harga pangan secara langsung. Beberapa provinsi sudah dapat menginput 100% pada aplikasi baru Panel Harga Pangan yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Selatan, Bengkulu, Riau, Kep. Bangka Belitung, DKI Jakarta, DI. Yogyakarta, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Tenggara.

3. Rakor Inflasi Kemendagri

- a. Inflasi Desember 2024 sebesar 1,57% (yoy), merupakan hasil dari koordinasi setiap pekan rapat pengendalian inflasi.
- b. Perum Bulog agar memprioritaskan penyaluran Beras SPHP di wilayah dengan harga masih tinggi
- c. Komoditas dengan harga tidak aman: Minyakita, Bawang putih, Beras Premium dan Medium Zona 3.
- d. Pada M2 Januari 2025, sebanyak 36 provinsi dan 321 kab/kota mengalami kenaikan IPH dari minggu sebelumnya. Komoditas penyumbang kenaikan IPH yaitu cabai rawit, cabai merah, dan daging ayam ras
- e. Kenaikan IPH terbesar di Sumatera oleh komoditas cabai merah, cabai rawit, dan daging ayam ras), di Jawa oleh cabai merah, cabai rawit, telur ayam ras dan daerah lainnya cabai rawit, cabai merah, dan Bawang Merah.
- f. Cabai Merah naik 34,55% dibandingkan Desember 2024, namun masih berada pada zona normal. Harga Cabai Rawit hingga M2 Jan 2025 naik 42% dibandingkan Des 2024 Rp67.816/kg, berada di atas batas atas HAP. Harga Telur Ayam Ras naik 3,4% dari Desember 2024.
- g. Per 12 Januari 2025, Beberapa komoditas di tingkat produsen dengan harga di bawah HPP/HAP yang perlu menjadi perhatian, di antaranya Kedelai Biji Kering (▼23,99%). Sedangkan di tingkat konsumen dengan harga di atas HET/HAP di antaranya Cabai Rawit Merah (▲41,49%), Beras Premium Zona 3 (▲21,28%), Beras Medium Zona 3 (▲18,69%), Bawang Putih (▲11,79%), dan Minyakita (▲11,09%).
- h. Penyebab kenaikan harga CRM diantaranya cuaca ekstrim (curah hujan tinggi, banjir, dan angin puting beliung) dan serangan hama OPT sehingga produksi turun serta terjadi penurunan pasokan cabai ke pasar/masyarakat.
- i. Rencana Aksi K/L bersama Petani Champion Cabai Indonesia dan Pemda antara lain dengan penyediaan cabai dengan harga petani, FDP dan dukungan Pemda untuk dukungan biaya transportasi dan subsidi harga jual di tingkat konsumen.
- j. Dalam rangka penyerapan gabah menerapkan standar. Realisasi pengadaan 2024 sebesar 1,2 juta ton. Rencana pengadaan 2025 sebanyak 3 juta ton.
- k. Rencana SPHP 2025 yaitu Januari (150 rb ton), Februari (150 rb ton), Maret (85 rb ton), April (56 rb ton), Mei (46 rb ton), Juni (78 rb ton), Juli (86 rb ton), Agustus (121 rb ton), September (104 rb ton), Oktober (140 rb ton), November (185 rb ton), dan Desember (295 rb ton).

- I. Bawang Merah: Produksi bawang merah Januari 2025 meningkat sekitar 175 ribu ton, terjadi panen raya hampir di semua sentra bawang merah. Upaya pengamanan stok dengan penyerapan dan penyimpanan panen raya (cold storage dan penyerapan oleh pelaku pangan), percepatan tanam di 200 kab/kota sentra produksi, memastikan sarana dan prasarana bekerja dengan baik, serta pembuatan sentra baru.

C. Gerakan Pangan Murah dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

1. Perkembangan pelaksanaan GPM Pusat dan daerah sampai dengan Januari 2025 dalam Upaya mengendalikan inflasi pangan, Badan Pangan Nasional melakukan kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan melalui Gerakan Pangan Murah (SPHP GPM) terutama di wilayah yang mengalami atau berpotensi gejolak pasokan dan harga pangan, serta di wilayah yang tingkat inflasi pangan relatif tinggi. SPHP GPM merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempermudah masyarakat memperoleh bahan pangan, dengan harga terjangkau dengan tujuan stabilisasi pasokan dan harga serta pengendalian inflasi pangan. Kegiatan SPHP GPM Tahun 2025 meliputi kegiatan GPM di 38 (tiga puluh delapan) provinsi dan 514 (lima ratus empat belas) Kabupaten/Kota.

SPHP GPM dapat dilaksanakan oleh Pusat, Dinas Pangan Provinsi, dan Dinas Pangan Kabupaten/Kota dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait seperti Perum BULOG, ID FOOD, BUMD Pangan, Dinas terkait, distributor, petani/peternak/gapoktan/ pelaku usaha pangan lainnya.

Komoditas pangan pada kegiatan SPHP GPM adalah komoditas pembentuk inflasi (*volatile foods*) antara lain beras, gula konsumsi, bawang putih, daging sapi/kerbau, daging ayam ras, dan minyak goreng yang dapat disediakan oleh Perum BULOG, ID FOOD, BUMD Pangan, distributor, dan petani/peternak/poktan/gapoktan. Sedangkan komoditas lainnya seperti cabai merah keriting, cabai rawit merah, bawang merah, telur ayam ras, dan komoditas pangan lainnya yang dihasilkan petani/peternak/ poktan/gapoktan.

Pelaksanaan GPM sampai dengan tanggal 31 Januari 2025 telah dilaksanakan sebanyak 166 kali pelaksanaan dengan rincian sebagai berikut: Pusat sebanyak 5 kali, provinsi sebanyak 13 kali dan Kabupaten/Kota sebanyak 148 kali pelaksanaan.

2. Perkembangan Penyaluran Beras SPHP merupakan beras yang berasal dari cadangan beras pemerintah (CBP) yang disalurkan

menggunakan skema subsidi dengan harga penjualan sesuai HET beras medium Rp12.500/kg untuk wilayah zona I.

3. Rapat Koordinasi kegiatan Gerakan Pangan Murah dengan hasil sbb:

- a. Secara keseluruhan, pada tahun 2024 Dinas Pangan di wilayah Jabodetabek telah melaksanakan kegiatan SPHP GPM menggunakan anggaran APBN, APBD dan mandiri/CSR. Rencana tahun 2025 untuk kegiatan SPHP GPM terus dimasifkan dan fokus pada replikasi kegiatan kios pangan baik di Provinsi atau Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi.
- b. Mitra vendor dan EO pelaksana kegiatan GPM berkomitmen untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang menjadi kewajiban sesuai dengan Petunjuk Teknis SPHP GPM TA 2025.
- c. Tindak lanjut:
 - Membuat infografis katalog produk-produk mitra vendor GPM sebagai sarana publikasi saat pelaksanaan kegiatan.
 - Melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja mitra vendor GPM dan EO.

D. Mobilisasi Pangan dari Daerah Surplus ke Daerah Defisit

Kegiatan SPHP FDP berupa bantuan biaya distribusi, meliputi biaya transportasi (termasuk bongkar dan muat) dan/atau kemasan /*packing* (termasuk sortasi dan biaya pengemasan). Pemberian FDP akan meningkatkan penerimaan produsen karena produsen tidak mengalokasikan biaya transportasi dan/atau kemasan/*packing*. Sementara itu, akses konsumen akan meningkat dalam memperoleh bahan pangan pokok dengan harga yang lebih murah dan wajar. Komoditas pangan yang dapat diintervensi melalui kegiatan SPHP FDP antara lain gabah/beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, cabai rawit merah, sapi/kerbau atau daging sapi/kerbau, ayam ras atau daging ayam ras, telur ayam ras, gula konsumsi, dan/atau komoditas pangan lainnya.

Pada bulan Januari 2025 penyaluran bahan pangan melalui SPHP FDP difokuskan pada penyusunan Petunjuk Teknis kegiatan dan koordinasi teknis dengan calon pengusul terkait pelaksanaan kegiatan FDP yaitu Surat usulan dari Koperasi Produsen Aslupama Maju Bersama dengan nomor surat 11/KOPASLUPAMA/I/2025 tanggal 6 Januari 2025 untuk komoditas bahan pangan dari gapoktan ke kios pangan.

E. Kios pangan

1. Perkembangan Kios Pangan Januari 2025

Kios Pangan merupakan upaya Pemerintah dalam memberikan kemudahan aksesibilitas pangan yang murah dan berkualitas melalui outlet Kios Pangan setiap hari sebagai bentuk intervensi dalam stabilisasi pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi pangan.

Keberadaan Kios Pangan diharapkan mampu memangkas rantai pasok distribusi pangan. Dengan memasarkan komoditas pangan langsung ke Kios Pangan, maka telah memotong rantai distribusi pemasaran sehingga harga dapat dikendalikan lebih rendah daripada harga pasar pada umumnya. Dalam rangka menjamin kepastian produksi, distribusi dan pemasaran hasil pangan dari sisi produsen serta jaminan kepastian stabilisasi harga dari sisi konsumen, maka diharapkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait dapat melaksanakan kegiatan secara lebih terkoordinasi dan terarah sehingga tujuan dari kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan melalui Kios Pangan dapat tercapai dan bermanfaat bagi produsen dan konsumen.

Perkembangan Kios pangan per 31 Januari sebanyak 453 Kios Pangan yang tersebar di 31 Provinsi dan 103 Kabupaten/Kota.

2. Coaching Aplikasi Stroberi Kasir

Tujuan *coaching* aplikasi stroberi kasir untuk dapat mengetahui secara menyeluruh terkait fungsi dan penggunaan Aplikasi stroberi kasir sehingga aplikasi ini mampu menjadi sistem pelaporan penjualan/keuangan di kios pangan. *Coaching* dilakukan dengan pemberian materi oleh BRI dan praktek aplikasi stroberi kasir.

Stroberi Kasir merupakan aplikasi *Point Of Sales* (POS) atau aplikasi manajemen kasir berbasis Android yang dikembangkan oleh BRI. Aplikasi ini memiliki berbagai fitur seperti: (1) mencatat riwayat transaksi, (2) membuat laporan keuangan, (3) membuat order ke supplier, (4) mengelola produk yang akan dijual, (5) Qris, (6) buka tutup kas dan (7) mengawasi dan mengevaluasi tagihan.

Tindaklanjut:

- a. Bapanas perlu bersurat ke BRI terkait data dan kebutuhan untuk diakomodir oleh stroberi kasir serta penyesuaian aplikasi.
- b. PKS penggunaan stroberi kasir untuk mendukung Kios Pangan.

F. Gerakan Aksi Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

1. Munas PERPADI 2025 dengan hasil sbb:

- a. Kegiatan Munas dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan, Ketua Umum Perpadi Indonesia, Kepala Badan Pangan Nasional, Direktur Utama Perum BULOG, Wakil Ketua

Komisi IV DPR RI, Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR, Anggota Komisi IV DPR RI, Anggota Komisi VI DPR RI, Direktur PPHTP Kementerian Pertanian, Direktur Pembiayaan Kementerian Pertanian, Direktur PLN, Ketua dan Perwakilan DPD dan DPC Perpadi se-Indonesia, dan tamu undangan dari berbagai K/L.

- b. Kegiatan Munas Perpadi tahun 2025 yang diselenggarakan dari tanggal 14-16 Januari 2025 mengangkat tema "Sinergi Perpadi Bersama Pemerintah Mewujudkan Swasembada Pangan Nasional" diharapkan dapat menjadi wadah diskusi dan pemecahan solusi bersama untuk mewujudkan cita-cita swasembada pangan. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi multi pihak, baik dari elemen petani, usaha penggilingan, Perum BULOG, Perusahaan Perberasan, Lembaga Pembiayaan dan Bank, dan Kementerian/Lembaga terkait.
- c. Pengurus Perpadi mengusulkan adanya fasilitasi kredit murah termasuk bantuan dan dukungan pembiayaan usaha khususnya kredit alsintan. Hadirnya kredit murah bagi petani dan usaha penggilingan diyakini dapat meningkatkan produksi dan menampung hasil panen padi-gabah di Indonesia.

1.3. Direktorat Distribusi Cadangan Pangan

1. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan NSPK Distribusi dan Cadangan Pangan Kegiatan penyusunan rekomendasi kebijakan dan NSPK dalam rangka penyelenggaraan distribusi dan cadangan pangan meliputi penyusunan Kajian, Grand Desain, Rekomendasi, Peraturan Kepala Badan, Ketetapan Kepala Badan, Dokumen Penugasan, Petunjuk Teknis (Juknis), Panduan Kegiatan, Pedoman, Standart Operating Procedure (SOP), dan NSPK lainnya. Pada Bulan Februari 2025, Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan telah melaksanakan kegiatan prioritas terkait dengan penyusunan NSPK sbb:
 - Keputusan Sestama tentang Tim Penyusunan Naskah Urgensi dan Rperpres tentang Rencana Pangan Nasional 2025-2029
 - Perbadan 03/2025 tentang Perubahan Perbadan 15/2023
 - Perbadan 04/2025 tentang Perubahan Perbadan 16/2023
 - Keputusan Deputi KSP No 6/2025 tentang Tim Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan GKP dan Beras untuk CBP
 - Kepbadan No 29/2025 tentang Juknis Tata Cara Penghitungan Jumlah CPP
 - Matriks Peran Hasil (MPH) Dit DCP Tahun 2025
 - Rancangan Revisi Kepbadan 591/2024 tentang Jumlah CPP 2025

- Draft SOP Pelepasan CPP
 - Draft SOP Pengadaan CPP (DN)
 - Draft SOP Penetapan BUMN Penyelenggara CDRP
 - Rancangan RPKM Pembiayaan CBP pada PERUM BULOG melalui Investasi Pemerintah (Harmonisasi)
 - Rancangan Revisi Perpres 125/2022
 - Rancangan Perpres Penguatan Logistik Nasional (Kemenko Ekon)
2. Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Distribusi dan Cadangan Pangan
- a. Rapat Koordinasi Pembahasan Transfer Data penerima Bantuan Pangan Tahun 2025 hasil sebagai berikut:
- Badan Pangan Nasional sudah menerima credential key dari Pusdatin Bappenas untuk selanjutnya diinput kepada SPLP dan dilakukan transfer data dari database Regsosek.
 - Proses transfer data PBP antara Pusdatin Bappenas dan Pusdatin Bapanas menggunakan SPLP sudah berhasil dilakukan.
 - Badan Pangan Nasional telah menerima enkripsi data sebanyak 16 juta PBP dan data cadangan sebanyak 2 juta PBP.
 - Perlu dilakukan konversi enkripsi data ke dalam format CSV, sehingga perlu script yang dapat mempercepat konversi data.
 - Pusdatin Bappenas akan mengirimkan script yang dapat mempermudah konversi data ke CSV.
 - Pusdatin Badan Pangan Nasional akan mengkonversi data dalam bentuk csv dan selanjutnya akan diserahkan ke Direktorat DCP.
3. Rapat Koordinasi Sosialisasi Perbadan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah. Adapun hasil rakor sbb:
- a) Perubahan Perbadan No. 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah
 - b) dengan mempertimbangkan untuk mendukung penguatan Cadangan beras pemerintah daerah perlu adanya dukungan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan dana desa;
 - c) Pengadaan cadangan beras pemerintah daerah dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran masing-masing daerah;
 - d) Tata cara penghitungan cadangan beras pemerintah daerah tidak mengalami perubahan, hanya mempertegas tahapan untuk penghitungan cadangan beras tingkat desa;

- e) Dinas urusan pangan provinsi dan kabupaten/kota menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - o Beberapa wilayah akan mengajukan penyusunan peraturan daerah terkait penyelenggaraan CPPD, baik yang sebelumnya memiliki peraturan ataupun yang sudah memiliki tetapi hanya peraturan kepala daerah;
 - o Provinsi dan kabupaten/kota sudah melakukan penghitungan jumlah cadangan beras masing-masing wilayah dan sudah menetapkan dan menganggarkan untuk pengadaannya. Mekanisme pengelolaan masih dititipkan kepada Perum BULOG atau mengelolaa sendiri;
 - o CPPD yang dititipkan kepada Perum BULOG masih terdapat addendum kuantum atau nilai rupiah dikarenakan adanya penyesuaian harga oleh Perum BULOG;
 - o Daerah menyampaikan adanya permintaan data untuk Cadangan beras tingkat kecamatan, terhadap hal ini Bapanas tidak menghitung hal tersebut.
 - f) Dinas urusan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota secara umum tidak mengalami kesulitan dalam menghitung cadangan beras untuk masing-masing wilayah.
4. Rapat koordinasi pembahasan rancangan rancangan Inpres Pengadaan gabah/Beras untuk CBP dengan hasil pembahasan sbb: Peraturan Badan ini; dan
- a) Berdasarkan hasil Rakortas tgl 26 Februari 2025, akan dilaksanakan pengadaan jagung sebanyak 1 juta ton tanpa batasan kualitas. arahan percepatan pengadaan, sumber anggaran, dan penyaluran diusulkan tertuang di dalam inpres.
 - b) Kemenko Pangan membuat draft pelaksanaan pengadaan jagung dengan merevisi draft pengadaan GKP/beras sebelumnya. Dimana sebelumnya telah diajukan kepada Setneg untuk diminta tanda tangan Presiden.
 - c) Forum menyepakati draft Inpres Pengadaan Jagung dibuat terpisah dengan mempertimbangkan masukan K/L yakni:
 - o Kementerian Keuangan telah melaksanakan harmonisasi regulasi pendanaan pengadaan beras dan harus koordinasi internal Kemenkeu terkait anggaran pengadaan jagung
 - o Kementerian Pertanian dan Bulog menyampaikan pelaksanaan pengadaan harus segera dilaksanakan agar momentum panen raya dapat diserap Bulog dan petani mendapatkan manfaatnya
 - d) Sekretariat Negara menekankan pentingnya memperhatikan Perpres 125/2022 yang masih berlaku dan melihat urgensi Inpres, Kemenko diminta untuk memperhatikan ketika pengusulan inpres

- e) Kemenko Pangan akan mengusulkan langsung Inpres tersebut kepada Presiden
5. Pelaporan Database Cadangan Pangan Pemerintah Pusat dan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagai penguatan cadangan pangan nasional, Badan Pangan Nasional perlu mengintegrasikan pengembangan sistem data dan informasi cadangan pangan sebagai acuan dalam pengambilan langkah strategis guna mendapatkan data terupdate yang objektif secara harian/mingguan/bulanan sebagai landasan penentu kebijakan. Sebagai integrasi data cadangan pangan nasional yang meliputi Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) dan Cadangan Pangan Masyarakat (CPM). Updating database CPP, CPPD, serta CPM/LPM melalui sistem aplikasi web Sigap Nasional yang dilakukan setiap hari oleh Perum BULOG, dan BUMN Pangan serta bulanan/mingguan oleh Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Berdasarkan hasil pelaporan yang dikirimkan secara rutin baik secara manual ataupun melalui Aplikasi Web Sistem Informasi Cadangan Pangan Nasional (sigapnasional.badanpangan.go.id),

2. Kegiatan Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemanfaatan Kewaspadaan Pangan

2.1 Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan, dengan kegiatan antara lain:

1. Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengendalian Kerawanan Pangan berupa Koordinasi Pengendalian Kerawanan Pangan
 - Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI
 - Pertemuan dengan Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) terkait rencana kegiatan Bantuan Pangan Terfortifikasi
 - Pendampingan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI Masa Sidang II tahun Sidang 2024-2025 di Kota Surakarta-Jawa Tengah dan Kabupaten Magetan-Jawa Timur
 - Konfirmasi Tagging Rincian Output (RO) yang mendukung Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2025
 - Koordinasi/Pembinaan/Monev/Supervis dengan K/L, OPD, dan Stakeholder
2. Penyusunan NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan berupa Penyusunan NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan.
 - Penyusunan konsep petunjuk teknis FSVA tingkat Nasional Tahun 2025, dilaksanakan dalam bentuk diskusi dan telaahan literature yang terkait indicator baru dalam penyusunan FSVA.
 - Melaksanakan diskusi untuk membahas outline petunjuk teknis bantuan Intervensi pengendalian kerawanan pangan tahun 2025.
 - Penyusunan konsep petunjuk teknis bantuan pangan terfortifikasi tahun 2025 dalam bentuk iskusi pembahasan outline juknis.

3. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan berupa Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA).
4. Kegiatan Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian kerawanan pangan berupa Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan dan Aksi Kesiapsiagaan Krisis Pangan.
5. Bantuan Pangan Terfortifikasi dan Biofortifikasi berupa penyaluran Bantuan Pangan Terfortifikasi.
6. Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan berupa Data Dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan.

2.2 Direktorat Kewaspadaan Pangan, dengan kegiatan antara lain:

- a) Koordinasi, Mendukung Penyelamatan Pangan. Badan Pangan Nasional/*National Food Agency* (NFA) terus berkomitmen dalam meningkatkan upaya pencapaian menuju Sistem Pangan Berkelanjutan di Indonesia guna mendukung ketersediaan dan pemanfaatan pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. Badan Pangan Nasional bersama Universitas Sahid (Usahid) bersinergi dengan menyelenggarakan webinar **Sustainable Nutrition for an Optimal and Health Promoting Diet that is Culturally Acceptable, Easily Accessible, and Eco-Friendly** (SNORCLY).
- b) Partisipasi dalam Workshop GRASP 2030. Permasalahan Susut dan Sisa Pangan (SSP) di Indonesia telah menjadi isu yang mendesak dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, karena dampak yang ditimbulkan tidak hanya terbatas pada ekonomi, tetapi juga mencakup aspek gizi serta lingkungan. Sejak tahun 2022, Badan Pangan Nasional menginisiasi Gerakan Selamatkan Pangan (GSP) di 15 Provinsi sebagai upaya pencegahan dan pengurangan SSP. “Penyelamatan pangan merupakan langkah strategis yang menghubungkan penanganan kerawanan pangan dengan memanfaatkan potensi “pangan berlebih” atau “pangan surplus”.
- c) Partisipasi dalam Pertemuan *Technical Meeting* SSC. Kolaborasi Badan Pangan Nasional/*National Food Agency* (NFA) dengan Pemerintah Denmark melalui *Danish Veterinary and Food Administration (DVFA)* dalam program *Strategic Sector Cooperation (SSC) on Food Loss and Waste (FLW)* di Indonesia akan difokuskan pada upaya menggerakkan kampanye Stop Boros Pangan untuk menumbuhkan kesadaran pada anak sekolah
- d) Partisipasi dalam Mandiri Investment Forum 2025. Ketahanan pangan merupakan salah satu pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi di sektor pangan menjadi elemen penting dan strategis apalagi saat ini pemerintah menempatkan pangan sebagai salah satu fokus pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Beberapa langkah strategis yang dilakukan Badan Pangan Nasional, yang mencakup aspek ketersediaan dan stabilitas pangan, kerawanan pangan,

serta penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, antara lain dengan memperkuat cadangan pangan pemerintah, memperkuat logistik dan infrastruktur rantai dingin pangan, menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan melalui Gerakan Pangan Murah dan Fasilitasi Distribusi Pangan untuk menjaga distribusi pangan yang merata dan terjangkau ke seluruh daerah. Untuk mendorong perubahan pola konsumsi pangan yang lebih beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) serta mengurangi tingkat pemborosan pangan juga menjadi konsen NFA. Selain itu, juga dilakukan penguatan regulasi dan pengawasan keamanan pangan segar di seluruh daerah.

- e) Partisipasi dalam FGD Keselamatan Pangan. Keberhasilan penanganan Food Loss and Waste (FLW) atau Susut dan Sisa Pangan (SSP) memerlukan komitmen dan kolaborasi lintas sektor, dari hulu ke hilir bersama sektor pentahelix ABCGM (Academics, Business, Community, Government, and Media), baik di pusat maupun daerah. Dalam penanganan SSP telah menerapkan pendekatan piramida penyelamatan pangan dengan prioritas utama pada pencegahan dan pengurangan. “Setelah itu dilakukan redistribusi makanan dengan mendonasikan makanan surplus kepada bank pangan atau organisasi penyelamatan pangan untuk didistribusikan kepada para penerima manfaat setelah dipastikan memenuhi keamanan pangan.
- f) Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan, berdasarkan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) merupakan salah satu tools early warning system sebagai dasar kebijakan pangan dan gizi. Penyusunan SKPG sesuai dengan amanat dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi, yang disusun secara periodik oleh pemerintah pusat dan daerah secara berkala (bulanan). Penyusunan SKPG bulanan paling sedikit memuat aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Sesuai hasil SKPG Rilis Februari, menunjukkan bahwa berdasarkan hasil komposit, terdapat 7 provinsi (18,42%) pada kategori “rentan” yaitu provinsi DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Papua, Papua Barat, dan Papua Barat Daya. Terdapat 7 provinsi (18,42%) dalam kategori aman, dan sebanyak 24 Provinsi (63,16%) dalam kategori waspada, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Berdasarkan indeks ketersediaan terdapat 3 provinsi (7,89%) dalam kategori “rentan”, yaitu: Sumatera Selatan, DI Yogyakarta, dan Kalimantan

Barat. Sedangkan sebanyak 26 provinsi (68,42%) dalam kategori waspada dan 9 provinsi (23,69%) dalam kategori aman. Berdasarkan indeks keterjangkauan terdapat 1 provinsi (2,63%) dalam kategori “rentan”, yaitu: Papua Pegunungan. Sedangkan 35 provinsi (92,11%) pada kategori waspada dan 2 provinsi (5,26%) dalam kategori aman. Sedangkan berdasarkan indeks pemanfaatan terdapat 7 provinsi (18,42%) dalam kategori “rentan”, yaitu: Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Papua, Papua Selatan, Papua Barat dan Papua Barat Daya, terdapat 8 provinsi (21,05%) pada kondisi waspada, dan 23 provinsi (60,53%) dalam kondisi aman.

Untuk mendukung analisis SKPG, terdapat informasi kondisi iklim sesuai analisis komposit BMKG dan informasi data kejadian bencana dari BNPB. Terkait dengan hasil analisis komposit iklim potensi basah dan kering dari data BMKG menunjukkan bahwa 89,49% wilayah kab/Kota di Indonesia pada kategori waspada, dan 8,37% pada kategori siaga. Selanjutnya untuk kejadian bencana, terdapat 19 provinsi (55,00%) mengalami kejadian bencana sampai dengan 10 kejadian, terdapat 10 provinsi (26,32%) mengalami kejadian bencana antara 11 – 50 kejadian, dan 9 provinsi (23,68%) tidak mengalami bencana. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, diperlukan sinergi lintas sektor baik dari pusat maupun daerah serta kerjasama kemitraan antar pemangku kepentingan untuk melakukan tindaklanjut sesuai dengan rekomendasi

3. Kegiatan Pemantapan Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

3.1 Direktorat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, dengan kegiatan antara lain:

3.2 Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan, dengan kegiatan antara lain:

1. Penyampaian Kertas Posisi Indonesia pada *electronic Working Group Codex Committee on Contaminants in Foods* untuk menindaklanjuti terbitnya sirkulasi tahap 2 pada *electronic Working Group (eWG) Codex Committee on Contaminants in Foods (CCCF)*, Badan Pangan Nasional selaku *Alternate MC* telah menyampaikan masukan Indonesia terkait *second draft of sampling plan for total aflatoxins and Ochratoxin A in Nutmeg, Dried Chilli and Paprika, melalui platform eWG Codex* serta penyampaian surat terkait hal tersebut kepada BPOM selaku Koordinator CCCF.
2. Penyampaian *Conference Room Document* posisi Indonesia pada Sidang *Codex Committee on Fresh Food and Vegetables* yang akan diselenggarakan di Mexico. Badan Pangan Nasional sebagai Koordinator MC CCFFV menyampaikan, *Conference Room Document (CRD)* sebagai posisi Indonesia melalui surat ke BSN.

3. Pemberian Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan yang dikeluarkan untuk pelaku usaha dan OKPPD dengan berkoordinasi dengan Badan Pangan Nasional selaku OKKPP. Pada bulan Februari 2025 telah dikeluarkan rekomendasi terkait penggunaan nama dagang yang dapat dimaknai sebagai klaim. Surat rekomendasi tersebut sebagai tindak lanjut dari surat permohonan dari pelaku usaha yang disertai dengan bukti hasil pengujian laboratorium atas pemenuhan klaim tersebut.
4. Rapat Koordinasi Lanjutan Penyelesaian Pending Isu Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan. Rapat ini telah menghasilkan beberapa rumusan rumusan penjelasan pasal 47 ayat (2c) yang diharapkan dapat mengakomodir kepentingan BPOM-Kemenperin, yaitu:
 - Alternatif 1 “Dalam hal Pangan Olahan berbasis industri, pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan dilaksanakan oleh Kepala Badan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian sesuai dengan kewenangannya.”
 - Dalam hal pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan untuk Pangan Olahan dilaksanakan oleh Kepala Badan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian sesuai dengan kewenangannya.
5. Pertemuan Persiapan Penilaian Sistem manajemen Pengawasan Keamanan Pangan Segar OKPPD Provinsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengatur bahwa urusan pengawasan pangan merupakan urusan konkuren yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar selain dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional (selaku OKKP-P) juga dilaksanakan oleh dinas urusan pangan provinsi dan kabupaten/kota. Untuk meningkatkan sistem pengawasan pangan segar di daerah mengacu pada Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pangan Sub Urusan Keamanan Pangan. Pada tahun 2025 terdapat 7 provinsi yang akan dinilai yaitu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, NTB, Sulawesi Tenggara, Papua, dan Papua Barat. Untuk itu, dilakukan pertemuan persiapan penilaian dalam rangka meningkatkan pemahaman personel di dinas terkait data dukung yang dibutuhkan. Penilaian OKKPD berupa verifikasi dokumen dan tinjauan lapang akan dilakukan pada bulan Maret-April 2025
6. Pertemuan Koordinasi Kegiatan Dekonsentrasi Penilaian Sistem Manajemen Pengawasan Keamanan Pangan Segar OKPPD

Kabupaten/Kota sebagai Upaya untuk penguatan sistem manajemen pengawasan keamanan dan mutu pangan pada tahun 2025,

3.3 Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan, dengan kegiatan antara lain:

- 1) **Rapat Tindak Lanjut Pengawasan HBKN**
Berdasarkan hasil pengawasan keamanan pangan segar menjelang HBKN 2024, masih ditemukan retail yang belum memiliki SPPB PSAT dan pangan segar yang tidak memenuhi persyaratan label sesuai dengan Perbadan No 1/2023 tentang Label Pangan Segar, diantaranya belum memiliki izin edar, tidak ada nama dan alamat produsen dan pencantuman klaim yang tidak diperbolehkan dan menindaklanjuti hal tersebut, Direktur 3.3 menyampaikan surat kepada retail agar melakukan perbaikan atas temuan ketidaksesuaian, yang mencakup pemenuhan SPPB PSAT, review kebijakan perusahaan, termasuk kebijakan terhadap pemasok dan melakukan sosialisasi kebijakan perusahaan kepada pemasok.
- 2). **Rapat Koordinasi Pengawasan Keamanan Pangan Mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG)**
Pengawasan keamanan pangan berupa pengujian keamanan pangan dilakukan terhadap komoditi pangan segar yang memiliki tingkat risiko keamanan pangan yang tinggi berdasarkan analisa risiko. Pengujian tersebut menggunakan uji cepat rapid test kit. Teknis pelaksanaan pengawasan lebih lanjut akan dijabarkan dalam Manual Pengawasan Keamanan Pangan Segar untuk Mendukung Program MBG. Pasokan bahan pangan untuk Program MBG diharapkan berasal dari : 1) pelaku usaha yang sudah memiliki nomor izin edar/penjaminan keamanan pangan atau pemasok yang sudah memiliki SPPB PSAT; 2) Pasar yang memiliki program keamanan pangan (PAS AMAN, Pasar Sehat, Pasar Aman Berbasis Komunitas); 3) produsen yang diketahui menerapkan praktik budidaya yang baik

4. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional

- 1) **Biro Perencanaan Kerjasama dan Humas**, melaksanakan kegiatan prioritas antara lain:
 1. Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi selama bulan Februari Tahun 2025 melakukan kegiatan sbb:
 - A. Pertemuan Dua Pihak (*Bilateral Meeting/BM*) Rancangan Awal Renja K/L TA 2026
Menindaklanjuti surat Direktur Pangan dan Pertanian Kementerian PPN/Bappenas Nomor T-01661/Dt.3.1/PP.04.04/02/2025, telah dilaksanakan pertemuan

Dua Pihak Rancangan Awal Renja K/L TA 2026 secara daring pada tanggal 11 Februari 2025, dengan hasil sebagai berikut:

1. Pertemuan *Bilateral meeting* dihadiri oleh Badan Pangan Nasional dan Kementerian PPN/Bappenas dan dipimpin oleh Koordinator Pangan di lingkungan Direktorat Pangan dan Pertanian. Hadir dari Badan Pangan Nasional yaitu Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Humas.
2. Pertemuan bertujuan untuk membahas Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Pangan Nasional Tahun 2026.

B. Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025

Dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan daerah, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortek Renbang) Tahun 2025 yang dilaksanakan secara daring pada tanggal 17-28 Februari 2025. Hal-hal penting pertemuan sebagai berikut:

- 1) Sesi pembukaan Rakortek dibuka oleh Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri yang dilanjutkan dengan pembahasan desk urusan
- 2) Desk urusan pangan dipimpin oleh Analis Kebijakan Ahli Madya Ditjen Bina Bangda Kemendagri dan dihadiri oleh perwakilan Badan Pangan Nasional, Bappenas dan OPD serta Bappeda provinsi secara terjadwal.
- 3) Rakortek difokuskan untuk menyepakati program dan subkegiatan beserta targetnya yang akan dilaksanakan oleh provinsi tahun 2026 serta memberikan rekomendasi atas usulan target indikator kinerja urusan pangan di daerah.
- 4) Indikator kinerja urusan pangan yang digunakan dalam rakortek, meliputi: (1) jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD); (2) persentase daerah rentan rawan pangan; (3) persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan; dan (4) skor PPH.
- 5) Kesepakatan Rakortek setiap provinsi dituangkan dalam berita acara yang dapat diakses melalui link: <https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1JZuVNvJsmmJZZ08LKMwm7q7nboaSAyhP>
- 6) Hasil Rakortek Renbang akan digunakan Pemerintah Daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah (Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD dan Rencana Strategis OPD).

C. Penyusunan Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029

Menindaklanjuti terbitnya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 telah dilaksanakan Rapat Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pangan

Nasional Tahun 2025-2029 pada 27 Februari 2025 secara hybrid dengan hasil berikut:

- a. Pertemuan dipimpin oleh Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Humas dan dihadiri oleh perwakilan Unit Kerja Eselon 2 lingkup Badan Pangan Nasional.
- b. Pertemuan bertujuan untuk menyelaraskan muatan Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 dengan substansi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.
- c. Beberapa hal yang menjadi pokok diskusi diantaranya:
 - 1) Memasukkan indikator sasaran kegiatan baru, yaitu:
 - persentase realisasi impor terhadap kuota impor pangan yang diampu pada direktorat ketersediaan pangan
 - persentase Rekomendasi kebijakan kewaspadaan pangan yang diampu pada direktorat kewaspadaan pangan
 - 2) Memastikan metadata dan konsep manual IKU untuk indikator RPJMN koefisien variasi (*Coefficient of Variation*) harga pangan kumulatif komoditas pangan pokok antar waktu dan antar wilayah, persentase daerah rentan rawan pangan, dan persentase beras fortifikasi dalam program bantuan pangan
 - 3) Melakukan penceramatan, termasuk mengidentifikasi Rincian Output (RO) turunan dari cascading masing-masing indikator
- d. Sebagai tindak lanjut, Unit Kerja diharapkan untuk mencermati kembali, memutakhirkan dan memberikan masukan atas substansi rancangan awal Renstra berupa:
 - 1) Pemutakhiran situasi ketahanan pangan berdasarkan capaian 2024 (Bab I dan II)
 - 2) Pemutakhiran pohon kinerja dan matriks target kinerja
 - 3) Pemutakhiran indikasi pendanaan per RO tahun 2025-2029, termasuk indikasi Lokasi RO dan alokasinya jika kegiatan dilaksanakan melalui dekonsentrasi

D. Revisi DIPA 1

Revisi DIPA 1 dilakukan dalam rangka Efisiensi anggaran sesuai Inpres No 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 dan Surat Menteri Keuangan nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 serta Surat Menteri Keuangan nomor S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025 tentang Tindaklanjut

Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Efisiensi Anggaran Badan Pangan Nasional sebesar Rp160.900.114.000,- dengan rincian belanja barang sebesar Rp 154.550.864.000,- belanja modal sebesar Rp 6.349.250.000,-. Efisiensi dilakukan terhadap anggaran yang ada di semua satker Badan Pangan Nasional, baik satker pusat maupun 38 satker dekonsentrasi. Usulan revisi DIPA-1 Badan Pangan Nasional telah disetujui Direktur Jenderal Anggaran melalui surat Nomor S-129/AG/AG.3/2025 tanggal 21 Februari 2025, hal Pengesahan Revisi Anggaran Efisiensi Badan Pangan Nasional TA. 2025.

2. **Kerja Sama Bidang Pangan**, melalui kegiatan:

- 1) Melakukan reviu dan menyampaikan Hasil Reviu dan Saran/Masukan atas konsep Naskah Perjanjian Kerja Sama antara Pusat Riset Hortikultura, Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Direktorat Penganekaragaman Konsumsi Pangan, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan tentang Sinergitas Penyusunan Kajian Mitigasi Dampak Perubahan Iklim Terhadap Komoditas Buah di Indonesia dalam rangka Peningkatan Ketahanan Pangan Nasional.
- 2) Melakukan reviu dan memberikan masukan atas draft Kesepahaman Bersama antara Badan Pangan Nasional dan Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia terkait Penguatan Ketahanan Pangan Melalui Program Keamanan Pangan Segar dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan.
- 3) Melakukan reviu dan memberikan masukan atas draft Joint Work Plan 2025 antara NFA dan WFP, terkait Pengembangan dan Advokasi Standar Beras Fortifikasi dan Kernel Beras Fortifikasi Nasional Republik Indonesia.
- 4) Melakukan fasilitasi komunikasi penelitian PhD Luh Putu Kim Biesterfeld kandidat PhD di Department of International Development di King's College London untuk diarahkan ke BPPSDMP Kementerian Pertanian, dengan tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi kapasitas pendapatan individu, dengan menitikberatkan kepada pertanian di kalangan pemuda pedesaan, mata pencaharian mereka dan aksesibilitas pangan.
- 5) Melakukan review dan menyampaikan masukan terhadap draft rancangan KepBadan tentang Tim Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Badan Pangan Nasional Tahun 2025.
- 6) Menyusun masukan Posisi Delri APEC PPFS SOM 1 dengan melibatkan lintas sektor termasuk di dalamnya: Update Food Security Roadmap towards 2030 dan masukan awal untuk Draft Term of Reference (TOR) PPFS APEC, sebagaimana permintaan

Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertanian dan telah disampaikan kepada secretariat APEC PPFS..

- 7) Memberikan tanggapan dan masukan terhadap permintaan masukan dan tanggapan oleh Kementerian Perdagangan, terkait permohonan co-sponsorship inisiatif APEC usulan Viet Nam “APEC Workshop on Promoting Agricultural Global Value Chains Responding to Climate Change”.
- 8) Memberikan masukan terhadap Deklarasi Menteri Pertanian BRICS (BRICS Agriculture Ministers Declaration).
- 9) Menanggapi permohonan kehadiran sebagai Representative Speaker terkait tema APTERR pada Pertemuan 1st Agriculture Working Group (AWG) Technical Meeting BRICS Keketuaan Brasil Tahun 2025, yang dikirim oleh Kementerian Pertanian serta mengkoordinasikannya dengan Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan selaku National Focal Point APTERR.
- 10) Memberikan Tanggapan atas Permintaan Masukan terhadap Zero Draft Agriculture Ministers Declaration BRICS Keketuaan Brasil 2025 yang dikirimkan oleh Kementerian Pertanian.
- 11) Melaksanakan fasilitasi administrasi PDLN pejabat/pegawai Badan Pangan Nasional dalam rangka mengikuti pelaksanaan Southeast Asia Symposium bagi Peserta New Zealand English Language Training for Officials (NZELTO) intake 57, 58, dan 59 di Hanoi, Vietnam pada tanggal 9-12 Februari 2025.
- 12) Melaksanakan fasilitasi administrasi PDLN pejabat/pegawai Badan Pangan Nasional dalam rangka menghadiri Waste Management Study Program in Japan yang akan diselenggarakan pada tanggal 9 – 13 Maret 2025 di Jepang.
- 13) Melaksanakan fasilitasi administrasi PDLN pejabat/pegawai Badan Pangan Nasional dalam rangka mengikuti Pelatihan BTSF "Sampling and Analysis: Mycotoxins" yang dilaksanakan di Italia pada tanggal 10 Februari 2025 s.d. 21 Februari 2025.
- 14).Melaksanakan fasilitasi administrasi PDLN sekaligus pembatalan PDLN pejabat/pegawai Badan Pangan Nasional dalam rangka menghadiri 13th Meeting of APTERR Council di Jepang pada tanggal 18 Februari 2025 s.d. 20 Februari 2025
- 15) Melaksanakan fasilitasi administrasi PDLN sekaligus pembatalan PDLN pejabat/pegawai Badan Pangan Nasional dalam rangka mengikuti BTSF Training on Sampling and Analysis – Mycotoxins di Spanyol pada tanggal 10 Maret 2025 s.d. 21 Maret 2025.
- 16) Mengikuti Rapat Rapat Rencana Kunjungan Direktur Jenderal Islamic Organization for Food Security (IOFS) yang dilaksanakan oleh Kementerian Luar Negeri pada tanggal 3 Februari 2025.
- 17) Melaksanakan Audiensi Badan Pangan Nasional (NFA) dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) yang

dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2025 di RR. Nusantara II NFA.

- 18) Melaksanakan audiensi kunjungan Kabupaten Boolang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara yang dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2025 di Ruang Perencanaan, Biro PKH.
- 19) Merespon Permohonan Kementerian Luar Negeri terkait rencana kegiatan Annual Consultation Visit (ACV) ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) yang akan dilaksanakan pada tanggal 3—14 Februari 2025 di Jakarta, yang fokus pada monitoring program Makan Bergizi Gratis, dengan menyampaikan bahwa program tersebut saat ini telah menjadi tugas fungsi yang menjadi tanggung jawab Badan Gizi Nasional (BGN).
- 20) Mengikuti Rapat Persiapan Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) Upgrade Negotiations, yang dilaksanakan oleh Kementerian Perdagangan pada tanggal 5 Februari 2025.
- 21) Mengikuti Rapat Sosialisasi Prioritas Korea Selatan pada Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) 2025 dan persiapan APEC Senior Official Meeting (SOM) 1 yang dilaksanakan oleh Kementerian Luar Negeri pada tanggal 5 Februari 2025.
- 22) Mengikuti Rapat Persiapan Peresmian Forum Koordinasi Kebijakan Luar Negeri (FKKLN), yang dilaksanakan oleh Kementerian Luar Negeri pada tanggal 05 Februari 2025.
- 23) Mengikuti Rapat Pembahasan Draft Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Keprotokolan di Lingkungan Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Biro OSH, NFA, pada tanggal 13 Februari 2024.
- 24) Mengikuti Sosialisasi Beasiswa/Pelatihan Kerja Sama Teknik Luar Negeri (KTLN) dan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) yang dilaksanakan oleh Kementerian Sekretaris Negara pada tanggal 13 Februari 2025
- 25) Mengikuti Rapat Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pangan Nasional dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).
- 26) Mengikuti sosialisasi pengisian formulir usulan rencana penarikan pinjaman dan hibah TA. 2026 dan proyeksi jangka menengah 2027-2030, yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan.
- 27) Mengikuti Rapat Koordinasi mengenai Pembahasan Draft *Plan of Action (PoA) atas Joint Declaration on the Strategic Partnership RI-Mesir* usulan Indonesia, yang dilaksanakan oleh Kementerian Luar Negeri.
- 28) Memfasilitasi dan melaksanakan pertemuan bersama Dr. Dori Patay, *School of Public Health, Faculty of Medicine and Health,*

Menzies Centre for Health Policy and Economics, University of Sydney, dan perwakilan SEAMEO RECFON Universitas Indonesia, terkait pembahasan Penelitian Tata Kelola Sistem Pangan di Indonesia.

- 29) Memfasilitasi audiensi Ikatan Pesantren Indonesia di Badan Pangan Nasional.
- 30) Mengikuti Rapat Koordinasi Usulan Skenario dan Strategi Implementasi Amandemen Kigali yang dilaksanakan oleh KLHK.
- 31) Mengikuti Pertemuan *Sustainable Development Goals (SDGs) Lecture Series 2025* bersama Prof. Jeffrey Sachs.
- 32) Mengikuti pertemuan pengumpulan data dan informasi, Penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Andalas terkait peran "*International Food Law dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan SDG 2 dan Implementasinya di Indonesia*".
- 33) Mengikuti pembahasan tindak lanjut partisipasi Indonesia pada *School Meals Coalition (SMC)* yang dilaksanakan oleh Kementerian Luar Negeri.
- 34) Mengikuti Sosialisasi Penyusunan Proposal Usulan Komitmen RAN OGI VIII 2025-2029 yang dilaksanakan oleh Bappenas.
- 35) Mengikuti pertemuan antara Badan Pangan Nasional dengan Lembaga Perempuan Dayak Nasional (LPDN).

3. **Pemberian Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik** dengan kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu:

- 1) Penyusunan dan penerbitan publikasi cetak melalui majalah bulanan Media NFA Volume 5 Nomor 1, Februari 2025 mengangkat isu utama terkait Serap Gabah Perkuat Stok Cadangan Pangan Pemerintah yang disebarluaskan di lingkup internal dan juga stake holder terkait.
- 2) Pada bulan Januari 2025, NFA telah menerbitkan 27 siaran pers resmi dengan rincian sebagai berikut:
 - 21 isu terkait ketersediaan dan stabilitas pangan,
 - 3 isu panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan,
 - 2 isu Stop Boros Pangan dan Kerawanan Pangan dan 1 isu lainnya.
- 3) Pelayanan informasi publik yang diberikan kepada pemohon informasi publik dan terselesaikan sesuai batas waktu yang dipersyaratkan.
- 4) Dalam rangka mendukung pelaksanaan komunikasi dan informasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden, Badan Pangan Nasional melaksanakan rapat koordinasi komunikasi dengan Kantor Komunikasi Presiden/ Presidential Communication Office (PCO) pada Senin, 13 Januari 2025 di Kantor PCO Jakarta. PCO menggali peran Badan Pangan Nasional berkaitan Program

Hasil Terbaik Cepat (PTHC) yaitu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain itu program Bantuan Pangan (banpang) beras juga menjadi perhatian PCO. Sejauh mana program banpang ini ditengarai bisa memengaruhi kondisi fiskal, serta bagaimana pengaruhnya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat berpendapatan rendah.

- E. Biro Keuangan Pengadaan dan Umum**, dengan kegiatan antara lain;
- a) Pembayaran Gaji dan Tunjangan Kinerja Bulan Februari 2025
 - b) Rapat persiapan koordinasi verifikasi dan akuntansi keuangan
 - c) Rapat persiapan penyusunan laporan keuangan pusat dan daerah
 - d) Rapat rekonsiliasi pertanggungjawaban APBN
- F. Biro Organisasi Sumber Daya Manusia dan Hukum**, dengan kegiatan antara lain;
1. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal
 - a) Pembahasan Rekonsiliasi Tunjangan Kinerja Bulan Januari
Rapat pembahasan rekonsiliasi tunjangan kinerja bulan Januari tahun 2025, dalam rapat.
 - b) Pembahasan internal Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan.
 - c) Penyusunan Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan.
 - d) Rapat pelaksanaan kegiatan integrasi SIMASN dengan MyASN,
 2. Layanan Sumber Daya Manusia
 - a) Perubahan jabatan pelaksana Badan Pangan Nasional
 - b) Pengusulan Kenaikan Pangkat Pegawai Lingkup Badan Pangan Nasional Periode Februari 2025
 - c) Pengusulan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Badan Pangan Nasional
 - d) Pelaksanaan Ujian Dinas Tingkat I Pegawai Badan Pangan Nasional
 - e) Pemutakhiran Data Pegawai Badan Pangan Nasional di Aplikasi SIMASN
 - f) Penyusunan konsep Surat Pernyataan Rencana Penetapan CPNS Tahun 2024
 - g) Penyusunan Dokumen Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Pengadaan PPPK Tahap 2
 - h) Penyusunan Dokumen Pengumuman Pasca Sanggah PPPK Tahap II 2024
 3. Layanan Hukum
 - a) Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
 - b) Penyusunan Naskah Perjanjian

- c) Penyusunan Instrumen Hukum
- d) Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

G. Pusat Data dan Informasi, dengan kegiatan antara lain:

- a) *Clearance* Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK)
 - 1. Pendampingan *Clearance*
 - 2. Pengisian Aplikasi EGA telah dilakukan pengisian sebagian atribut dari 8 aplikasi yang akan dilakukan *clearance* pada aplikasi EGA.
- b) Kebijakan dan Penyelenggaraan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- c) Tata Kelola TIK, dengan penyusunan dokumen terkait Tata Kelola TIK yaitu dokumen Standar Pengembangan Aplikasi
- d) Persiapan Penilaian Indeks SPBE Tahun 2025. Untuk meningkatkan Nilai Indeks SPBE tahun 2025 serta untuk memantapkan penyelenggaraan digitalisasi, Badan Pangan Nasional perlu menetapkan strategi kegiatan yang akan dilakukan di tahun 2025.
- e) Kelola Server Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) ada penambahan Virtual Machine (VM) baru sebanyak 3 VM di PDNS1 yang diperuntukan untuk instalasi Wazuh, monitoring VM dan safeline. Dalam rangka penguatan keamanan asset data dan informasi di Pusat Data Nasional, pada bulan Februari telah dilakukan pemasangan Endpoint Detection and Respon (EDR) sejumlah 55 VM. Selain itu juga di beberapa VM di PDNS 1 dilakukan pemasangan Web Application Firewall (WAF). Detail penggunaan resource PDNS 1 Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) oleh Badan Pangan Nasional.
- f) Server Kendali IT. Penggunaan *resource* pada Ruang Pusat Kendali IT Badan Pangan Nasional.
- g) Jaringan Internet untuk penggunaan *Bandwidth*, *Koneksi Advice ke Access Point (AP)* dan *Fortiget* untuk peningkatan keamanan jaringan internet Badan Pangan Nasional.
- h) Helpdesk (Sistem Akselerasi Pelayanan untuk Anda/SAPA).
- i) Pembangunan Sistem Informasi Pangan dan Gizi (SIPG), Portal Satu Data Pangan, dan Sistem Informasi Pangan (SiPangan) Daerah.
- j) Monev integrasi aplikasi untuk Integrasi Aplikasi Food Security and Vulnerable Atlas (FSVA), Integrasi Aplikasi Panel Harga melalui SPLP, Integrasi Neraca Bahan Makanan melalui SPLP, Integrasi melalui webAPI.badanpangan.go.id., dan Sebagai tindaklanjut dari penyediaan data penerima manfaat bantuan pangan beras, pada tanggal 3 Februari 2025 telah dilakukan transfer data penerima manfaat sebanyak 18 (delapan belas) juta data dari Bappenas sebagai penyedia data ke Badan Pangan Nasional melalui SPLP.

Selanjutnya pada minggu ke-2 Februari Badan Pangan Nasional diundang oleh Komdigi untuk evaluasi transfer data.

- k) **Monitoring Sistem** untuk keberlanjutan pemantauan terhadap beberapa sistem lingkup Badan Pangan Nasional diantaranya: Derawan, FSVA, Neraca Bahan Makanan, Panel Harga, Portal Satu Data Pangan, Proyeksi Neraca Pangan, Sigap Nasional, Simonstok, SKPG, SSO, Statistik, Temali, Badan Pangan Nasional (Web Utama), Ruang IT Control, E-Pegawai (Absensi), dan SiPangan.
- l) *Backup Cloudnesia*. Sehubungan kontrak backup cloud sudah berakhir, Pusdatin Pangan saat ini dibantu dalam melakukan pemindahan file backup yang semula di cloud alibaba ke server lokal Pusdatin Pangan. Proses backup tidak lagi dilakukan secara otomatis dan tidak terjadi sinkronisasi replikasi antar server backup dan server asli.
- m) Pengembangan Intranet (Single Sign On/SSO) Badan Pangan Nasional
- n) Pendampingan Pembangunan Aplikasi pada petugas Panel Harga Pangan, pembangunan SiPangan daerah, dan pembangunan SIJADIN.
- o) Keamanan Siber

H. **Inspektorat**, dengan kegiatan sbb;

- a) **Reviu Laporan Keuangan Satker**
Tujuan reviu laporan keuangan adalah untuk memastikan laporan keuangan yang disusun sudah sesuai dengan Standar Akuntabilitas yang berlaku. Reviu dilaksanakan pada 38 Satker Dekonsentrasi Badan Pangan Nasional dengan output adanya catatan hasil reviu yang ditandatangani oleh tiga pihak, yaitu Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum, Tim Reviu Inspektorat dan Satker Dinas yang menangani urusan pangan di daerah.
- b) **Analisis hasil Uji Petik dan Desk Reviu bantuan Pangan tahap III Masa Perpanjangan**
Kegiatan ini outputnya berupa catatan hasil uji petik terhadap 3 lokasi yaitu Provinsi Jawa Barat, Banten dan Jawa Tengah. Selain itu, catatan desk reviu terhadap sisa tagihan atas penyaluran di Kab/Kota seluruh Indonesia sampai dengan 31 Januari 2025.
- c) **Reviu Laporan Kinerja (LAKIN) Eselon I Badan Pangan Nasional**. Kegiatan ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 53 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Reviu dilakukan oleh Tim APIP Inspektorat Badan Pangan Nasional.
- d) **Reviu Buka Blokir dan Revisi Anggaran Badan Pangan Nasional TA. 2025**. Ruang lingkup reviu alokasi buka blokir dan revisi anggaran di lingkup Badan Pangan Nasional TA.2025 adalah penelaahan atas

dokumen sumber yang dilakukan secara terbatas pada DIPA, TOR, RAB dan dokumen pendukung terkait lainnya.

- e) Reviu Laporan Kinerja Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan setiap awal tahun sebagai bagian dari proses pelaporan kinerja Instansi Pemerintah yang mengacu pada PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjaian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja yang dilaksanakan oleh APIP di Instansi masing-masing.

3.3 Kegiatan Kepala Badan Pangan Nasional

Kegiatan Kepala Badan Pangan Nasional Selama Bulan Januari Tahun 2025:

1. Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi bersama Wakil Pertanian (Wamentan) Sudaryono berkunjung ke lokasi Operasi Pangan Murah di Kantor Pos Indonesia Bogor dan Cibinong, Jawa Barat. Dengan adanya gerai pangan murah seperti ini akan turut membantu penyerapan dari hulu dan mendukung penyediaan pasokan dengan harga yang baik di hilir.



Operasi Pangan Murah dilaksanakan secara simultan bersama berbagai pihak, mulai dari Pemda, BUMN sampai swasta, untuk mendekatkan pangan murah bagi masyarakat. Pelaksanaan OP Pangan Murah melalui jaringan PT Pos Indonesia sampai hari ini telah merambah hingga 265 titik lokasi. Di samping itu, program Gerakan Pangan Murah (GPM) juga tetap digencarkan Badan Pangan Nasional bersama pemerintah daerah. Per 21 Februari, GPM telah menyentuh angka 717 kali di 13 provinsi dan 88 kabupaten/kota. Rinciannya di Januari 166 kali dan Februari ini di 551 kali.

2. Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi, menyampaikan bahwa salah satu komoditas yang diperhatikan secara



serius adalah minyak goreng MinyaKita. Upaya untuk menurunkan harga MinyaKita di pasaran menjadi target yang harus diwujudkan pemerintah. Harga MinyaKita ditargetkan penyaluran 2 kali lipat dari biasanya. Harganya harus di bawah Rp 15.700 per liter.

Berdasarkan Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional per 25 Februari, rerata harga di tingkat konsumen secara nasional berada di Rp 17.679 per liter. Untuk stok minyak goreng secara nasional masih memadai dan bahkan melebihi kebutuhan konsumsi sebulan. Dalam Proyeksi Neraca Pangan Nasional Tahun 2025 per 21 Februari 2025, diproyeksikan kebutuhan konsumsi minyak goreng di Ramadan atau Maret 2025 akan meningkat sekitar 14,67 persen atau menjadi 488,4 ribu ton dibandingkan bulan sebelumnya. Estimasi kebutuhan konsumsi di Februari 2025 adalah 425,9 ribu ton.

Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dalam bentuk minyak goreng per 26 Februari total ada 99 ribu kiloliter yang ada di ID FOOD dan Perum Bulog. Sedangkan ketersediaan minyak goreng secara nasional diestimasikan pada Maret 2025 total ada 815,4 kiloliter.

3. Pemerintah menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan dengan menggelar operasi pasar pangan murah menjelang Ramadan 1446 Hijriah. Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan, hal ini merupakan bentuk komitmen pemerintah menghadirkan pangan yang lebih dekat ke masyarakat.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah sesuai keputusan rapat bersama Menko Pangan, Menteri Pertanian, Kementerian

Perdagangan, semua kementerian lembaga yang terkait pangan, BUMN dan *private sector* adalah



pelaksanaan pasar pangan murah secara serentak yang dimulai dari tanggal 24 Februari 2025 yang tersebar di 4.000 titik di seluruh Indonesia seperti di Kantor Pos Indonesia dan di 514 kabupaten/kota.

Pangan pokok strategis selama operasi pasar yang diprioritaskan ada 5 komoditas pangan yaitu Minyakita, bawang putih, gula konsumsi, daging kerbau beku, dan beras SPHP. Jenis pangan lain juga tetap disediakan.

4. Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengajak pemerintah daerah (Pemda) untuk semakin memperkuat neraca pangan daerah masing-masing guna

memastikan ketersediaan dan stabilitas pangan di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini disampaikan dalam Rakor Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan



jelang Ramadan yang digelar secara hybrid dan dihadiri oleh kementerian/lembaga terkait, BUMN pangan, asosiasi, pelaku usaha serta dinas urusan pangan provinsi dan kabupaten/kota.

Dengan adanya neraca pangan yang kuat, Pemda dapat lebih efektif dalam mengantisipasi fluktuasi harga dan memastikan distribusi pangan berjalan lancar, terutama pada momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri. Ia mengungkapkan salah satu komoditas yang banyak permintaan jelang puasa adalah cabai.

Berdasarkan prognosa neraca pangan nasional, pemerintah memastikan stok pangan aman khususnya menghadapi momentum Ramadan.

5. Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) memastikan bahwa stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog tetap terjaga untuk tahun 2025. Hal ini terjadi atas kerja keras pemerintah yang telah menyiapkan antisipasi ketersediaan stok CBP sejak tahun sebelumnya.

Kepala NFA Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi potensi gejolak harga dan kondisi pangan di tahun mendatang.

Sebagaimana diketahui, stok CBP yang disimpan di Bulog di awal 2025 yang merupakan transfer stok dari 2024, tercatat menjadi yang tertinggi di angka 2 juta ton. Sementara berdasarkan proyeksi neraca pangan nasional, stok beras secara nasional di awal 2025 juga cukup kuat di angka 8,148 juta ton

Pernyataan Kepala NFA Arief Prasetyo Adi tersebut untuk memastikan kondisi perberasan di Indonesia yang kondusif, setelah adanya pengumuman kedaruratan pangan terhadap beras yang baru dikeluarkan Filipina pada 3 Februari lalu. Deklarasi tersebut dikeluarkan oleh The Department of Agriculture untuk mengatasi lonjakan harga beras di sana.

Mengutip laman resmi The Philippine News Agency (pna.gov.ph), adanya deklarasi kedaruratan tersebut memungkinkan Pemerintah Filipina melepaskan



cadangan stok beras yang dimiliki oleh Otoritas Pangan Nasional negara tersebut ke masyarakat. Untuk diketahui, pada Januari 2025, Filipina

mengalami deflasi beras di 2,3 persen setelah sebelumnya beras di Desember 2024 mengalami inflasi 0,08 persen.

Sesuai kewenangan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2021, Badan Pangan Nasional dapat menugaskan Bulog dalam hal pengelolaan CBP yang disalurkan dalam rangka intervensi stabilisasi pangan dalam bentuk penyaluran bantuan pangan pemerintah, stabilisasi pasokan dan harga pangan, maupun manakala terjadi keadaan darurat, seperti bencana alam.

Selain memastikan ketersediaan stok, Badan Pangan Nasional juga terus berkoordinasi dengan *stakeholder* terkait, untuk memastikan distribusi beras berjalan lancar dan tepat sasaran. Dengan strategi ini, pemerintah berupaya menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, terutama di tengah dinamika global yang dapat mempengaruhi pasokan pangan. Langkah ini sejalan dengan kebijakan ketahanan pangan nasional yang bertujuan untuk memperkuat produksi dalam negeri dan berkomitmen pada swasembada pangan. Pemerintah akan terus memantau kondisi pasokan dan permintaan beras serta menyesuaikan kebijakan sesuai perkembangan di lapangan.

6. Sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) menindaklanjutinya dengan melakukan efisiensi anggaran. Aklimatisasi anggaran itu dibahas dan disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta.

Pagu awal Badan Pangan Nasional Rp 329,95 Miliar. Kemudian menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 serta surat Menteri Keuangan Nomor S-75, Badan Pangan Nasional mengalami efisiensi Rp 160,9 Miliar atau sekitar 48,76 persen, sehingga pagu Badan Pangan Nasional menjadi Rp 169,05 Miliar.

Anggaran yang diefisienkan terdiri dari alat tulis kantor (ATK) sejumlah Rp 6,41 M atau 81,27 persen; kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya Rp 8,58

M atau 48 persen; kajian, analisis, diklat, dan bimtek Rp 11,08 M atau 35 persen, dan honor output kegiatan jasa profesi Rp 7,55 M atau 39,48 persen. Selanjutnya sewa gedung, kendaraan, dan peralatan Rp 0,5 M atau 8,31 persen; lisensi aplikasi Rp 1,48 M atau 76,74 persen; jasa konsultan Rp 0,6 M atau 100 persen; bantuan pemerintah Rp 15,62 M atau 64,34 persen; pemeliharaan dan perawatan Rp 0,34 M atau 5 persen; perjalanan dinas Rp 86 M atau 67,86 persen; peralatan dan mesin Rp 2,9 M atau 78,49 persen, dan infrastruktur Rp 19,8 M atau persen.



Meskipun demikian, setelah efisiensi ini Badan Pangan Nasional tetap berkomitmen mengimplementasikan program-program andalan yang berkaitan dengan stabilisasi, kerawanan, kewaspadaan, penganeekaragaman konsumsi, dan keamanan pangan. Misalnya saja program stabilisasi seperti Gerakan Pangan Murah (GPM) baik pelaksanaan oleh pusat maupun daerah melalui dana dekonsentrasi ke 38 provinsi, Fasilitas Distribusi Pangan (FDP) dengan target 1.000 ton, dan enumerator panel harga pangan yang didukung 1.053 orang se-Indonesia.

Ada pula bantuan pangan bencana 26.800 paket, penyaluran beras fortifikasi 1.944 paket, dan penyusunan FSVA (*Food Security and Vulnerability Atlas*) di 38 provinsi. Selanjutnya program promosi penganeekaragaman konsumsi pangan tetap jadi prioritas diiringi dengan pengembangan usaha pengolahan pangan, serta sertifikasi dan registrasi juga pengawasan keamanan pangan segar.

7. Salah satu kiat pemerintah untuk menstabilkan pangan pokok strategis jelang Ramadan dan Idulfitri semakin dipertajam. Ini mengacu pada arahan Presiden Prabowo Subianto agar harga bagi masyarakat mesti baik dan stabil saat momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) tersebut.

Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi memastikan implementasi langkah untuk menstabilkan harga pangan dengan cara mempertemukan hulu ke hilir dan mempertebal stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Pemerintah akan mengeluarkan stok dari BUMN ke pasaran untuk menekan harga.

Mengenai fluktuasi harga, menjadi perhatian pemerintah karena pergerakan



inflasi komponen *volatile food* atau inflasi pangan kerap mengalami kenaikan pada saat Ramadan dan Idulfitri.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi pangan secara tahunan di Maret 2024 berada di 10,33 persen dan April 2024 di 9,63 persen. Sementara pada 2023, awal Ramadan dimulai pada minggu terakhir Maret dengan inflasi pangan di 5,83 persen dan April 2023 di 3,74 persen.

Sedangkan inflasi pangan secara tahunan di Januari 2025 mencapai 3,07 persen. Capaian ini merupakan yang paling rendah dibandingkan bulan

Januari di 3 (tiga) tahun terakhir. Pada Januari 2022 tercatat di 3,35 persen. Sementara Januari 2023 di 5,71 persen dan Januari 2024 tercatat inflasi pangan di 7,22 persen.

Kepala Badan Pangan Nasional menjelaskan kembali tentang kondisi gula konsumsi, bahwa import untuk pengadaan Gula Kristal Mentah (GKM) atau *raw sugar* sejumlah 200 ribu ton untuk penguatan stok CPP. Berdasarkan data BPS, secara Nasional harga gula sampai minggu pertama (M1) Februari 2025 mengalami eskalasi sebesar 0,89 persen dibandingkan Januari 2025. Sampai M1 Februari 2025, rerata harga gula pasir menurut BPS berada di 18.365 per kilogram (kg).

8. Kepala Badan Pangan Nasional menyampaikan bahwa untuk mengantisipasi risiko fluktuasi harga gula konsumsi, terutama jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri, penguatan stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) di BUMN pangan harus diperkuat. Langkah pengadaan *raw sugar* atau Gula Kristal Mentah (GKM) yang diimport Indonesia, dengan menjamin tidak memberikan dampak ke petani, terutama saat panen.



Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sampai minggu pertama Februari 2025, terjadi penambahan jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga gula pasir. Pada minggu ketiga Januari terdapat 118 kabupaten/kota. Dari itu, jumlahnya semakin bertambah menjadi 153 kabupaten/kota di minggu kelima Januari.

Stok CPP dalam bentuk gula pasir per 12 Februari total ada 34 ribu ton. Stok tersebut dikelola oleh ID FOOD sejumlah 22 ribu ton dan Perum Bulog sebanyak 12 ribu ton. Jika dibandingkan dengan rerata kebutuhan konsumsi bulanan yang sekitar 235 ribu ton per bulan, maka stok CPP gula berada di kisaran ketercukupan 14,47 persen.

Berdasarkan proyeksi neraca gula konsumsi yang diolah Badan Pangan Nasional per 21 Januari, diestimasikan kebutuhan konsumsi bulanan di Maret 2025 akan meningkat karena berbarengan dengan momentum bulan

Ramadan dengan proyeksi kebutuhan konsumsi akan meningkat 13,39 persen atau menjadi 251,8 ribu ton dibandingkan Februari yang 222 ribu ton.

Sementara estimasi produksi GKP akan mulai meningkat pada Mei 2025 di kisaran sejumlah 166 ribu ton. Lalu Juni di 392 ribu ton dan Juli di 555 ribu ton. Proyeksi puncak panen raya GKP diperkirakan akan terjadi pada Agustus di 621 ribu ton. Total kebutuhan konsumsi tahunan diproyeksikan mencapai 2,841 juta ton.

9. Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) menyatakan bahwa inovasi dan invensi yang dijelaskan oleh IPB terkait ketahanan pangan, mesti dapat diimplementasikan secara kolaboratif. Hal tersebut dikatakan saat ditemui di *Agribusiness and Technology Park* Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor, Jawa Barat).

Data produktivitas padi dan beras yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2024 luas panen padi mencapai 10,05 juta ton. Dengan besaran luas tersebut, petani mampu menghasilkan Gabah Kering Giling (GKG) sebanyak 53,14 juta ton dan beras 30,62 juta ton. Sementara besaran



konsumsi beras tahunan di 2024 menurut NFA berkisar di 30,73 juta ton.

Selanjutnya pada tahun 2023, luas panen padi berada di angka 10,21

juta ton. Hasilnya produksi GKG yang bersumber dari panen dalam negeri bisa mencapai 53,98 juta ton dan beras hingga 31,10 juta ton. Dari itu, konsumsi beras secara

Berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan Nasional Tahun 2025 per tanggal 21 Januari, dari 12 (dua belas) pangan pokok strategis diestimasi sebagian besar dapat dipenuhi dari produksi domestik. Hanya kedelai, bawang putih, dan daging sapi/kerbau yang harus terus diperhatikan perkembangannya.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan lingkup Badan Pangan Nasional pada periode bulan Januari Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Badan Pangan Nasional melaksanakan 2 (dua) program yaitu: Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas; dan Program Dukungan Manajemen, yang terdiri dari 4 (empat) kegiatan dengan 63 output/RO berdasarkan DIPA Induk Badan Pangan Nasional Tahun 2025 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 329.957.285.000,- (Tiga ratus dua puluh sembilan milyar Sembilan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
2. Realisasi keuangan pada bulan Februari Tahun 2025 sebesar Rp. 9.977.745.098,- atau 185,58% dari target Badan Pangan Nasional. Realisasi selain untuk pembayaran gaji dan tunjangan selama bulan Februari 2025 juga dalam persiapan pelaksanaan kegiatan periode selanjutnya.
3. Realisasi fisik sampai bulan Februari Tahun 2025 sesuai target pencapaian KRO dan Output/RO Tahun 2025 adalah
 - a) AEA 001, Kebijakan Ketersediaan Pangan.
 - b) AEA 002 Kebijakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.
 - c) AEA 003, Kebijakan Distribusi dan Cadangan Pangan Pangan.
 - d) AFA 002, NSPK Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.
 - e) PBR 001, Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan.
 - f) PBR 002, Rekomendasi Kebijakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.
 - g) QDD 002, Gerakan Pangan Murah.
 - h) QDD 003, Kios Pangan yang dikembangkan.
 - i) QMA 001, Neraca bahan Pangan.
 - j) QMA 002, Data dan Informasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.
 - k) AEA 001, Rekomendasi Kebijakan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan.
 - l) AEA 002, Rekomendasi Kebijakan Perumusan Standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.
 - m) AEA 003, Rekomendasi Kebijakan Penerapan Standar Standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.
 - n) AFA 001, NSPK Penganeekaragaman Konsumsi Pangan.
 - o) PCA 001, Sertifikikasi Keamanan Pangan Segar.
 - p) PEH 001, Promosi Pangan B2SA.
 - q) QDB 001, Fasilitasi dan Pembinaan Pasar Segar Aman.
 - r) QIA 002, Pangan segar yang memenuhi Syarat Keamanan Pangan Segar.

4. Pelaksanaan kegiatan Badan Pangan Nasional selama bulan Februari Tahun 2025 tetap dilakukan terutama penguatan koordinasi untuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan terutama kondisi tingginya harga pangan pokok yang berdampak tingginya inflasi pangan bergejolak atau *volatile food*.
5. Dinamika yang terjadi terhadap dokumen anggaran selama bulan Januari Tahun 2025 adanya anggaran yang masih diblokir sebesar Rp.15.632.651.000,-. Sehingga total pagu non blokir yang dipertanggungjawabkan pada periode laporan ini sebesar Rp.275.718.455.000,- (Dua ratus tujuh puluh lima milyar tujuh ratus delapan belas juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

4.2 Permasalahan

Secara umum, tidak ditemukan kendala berarti dalam pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Badan Pangan Nasional, namun demikian terdapat beberapa permasalahan atau kondisi yang belum sesuai harapan pada pelaksanaan program dan kegiatan selama bulan Januari Tahun 2025, yaitu:

1. Masih rendahnya realisasi anggaran lingkup Badan Pangan Nasional karena adanya pemblokiran anggaran pada DIPA Induk Badan Pangan Nasional yang disebabkan belum lengkapnya dokumen perencanaan untuk membuka blokir dan adanya penghematan anggaran;
2. Perlunya proses pembukaan blokir anggaran dan perpindahan alokasi anggaran antara output tanpa merubah target fisik kegiatan;
3. Penyiapan persyaratan administrasi untuk pencairan keuangan berdampak pada penyerapan keuangan belum maksimal

4.3 Rekomendasi

Terhadap beberapa kendala/permasalahan yang ada dan sebagai bentuk perbaikan ke depan, Badan Pangan Nasional akan melakukan beberapa langkah perbaikan sebagai berikut:

1. Penyiapan dokumen perencanaan, anggaran dan keuangan yang lebih baik.
2. Meningkatkan intensitas koordinasi pelaksanaan program dan anggaran lingkup Badan Pangan Nasional
3. Meningkatkan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

Lampiran 1.
Lampiran III DIPA Revisi 1 Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 125.01.1.690590/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:0677-9063-0000-7731

Kementerian Negara/Lembaga : (125) BADAN PANGAN NASIONAL
Unit Organisasi : (01) BADAN PANGAN NASIONAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (690590) BADAN PANGAN NASIONAL

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	690590	BADAN PANGAN NASIONAL													
		RENCANA PENARIKAN DANA	4.900.312	5.389.205	12.748.470	12.798.229	25.279.350	25.734.950	24.851.302	24.981.277	31.524.960	28.141.227	26.573.457	52.795.715	275.718.455
		BELANJA PEGAWAI	3.112.715	3.112.715	3.112.715	3.112.715	6.225.431	6.225.431	6.225.431	6.225.431	6.225.431	6.225.431	6.225.431	6.225.431	62.254.305
		BELANJA BARANG	1.787.596	2.257.470	9.367.927	9.419.456	17.633.104	17.853.715	18.045.689	18.162.665	21.960.395	21.308.514	19.735.694	44.986.621	202.518.846
		BELANJA MODAL	0	19.020	267.828	266.058	1.420.816	1.655.805	580.182	593.182	3.339.135	607.282	612.333	1.583.664	10.945.304
	125.01.HA.6875	Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	195.043	227.367	2.937.769	3.096.451	6.031.081	6.031.081	6.031.081	6.031.081	6.031.081	9.031.081	6.515.935	12.633.739	64.792.789
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	195.043	227.367	2.899.716	3.058.398	5.954.974	5.954.974	5.954.974	5.954.974	5.954.974	8.954.974	6.439.829	12.470.590	64.020.789
		53 BELANJA MODAL	0	0	38.053	38.053	76.106	76.106	76.106	76.106	76.106	76.106	76.106	163.149	772.000
	125.01.HA.6876	Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	35.369	35.369	2.008.145	2.008.145	4.016.289	4.016.289	4.202.478	4.202.478	10.549.493	3.904.544	4.640.131	13.958.272	53.577.000
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	35.369	35.369	2.007.231	2.007.231	4.014.463	4.014.463	4.120.415	4.120.415	7.732.228	3.822.481	4.558.068	13.840.867	50.308.600
		53 BELANJA MODAL	0	0	913	913	1.826	1.826	82.063	82.063	2.817.266	82.063	82.063	117.404	3.268.400
	125.01.HA.6877	Pemantapan Pengankaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	170.236	170.236	2.053.974	2.054.184	3.982.954	3.982.954	3.982.954	3.982.954	3.982.954	3.982.954	3.982.954	7.955.530	40.284.839
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	170.236	170.236	1.863.494	1.863.695	3.601.994	3.601.994	3.601.994	3.601.994	3.601.994	3.601.994	3.601.994	7.193.619	36.475.239
		53 BELANJA MODAL	0	0	190.480	190.490	380.960	380.960	380.960	380.960	380.960	380.960	380.960	761.910	3.809.600
	125.01.WA.6874	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	4.499.663	4.956.233	5.748.582	5.639.448	11.249.027	11.704.627	10.634.790	10.764.765	10.961.432	11.222.648	11.434.438	18.248.175	117.063.827
		51 BELANJA PEGAWAI	3.112.715	3.112.715	3.112.715	3.112.715	6.225.431	6.225.431	6.225.431	6.225.431	6.225.431	6.225.431	6.225.431	6.225.431	62.254.305
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	1.386.948	1.824.497	2.597.484	2.490.131	4.061.673	4.282.284	4.368.306	4.485.282	4.671.199	4.929.065	5.135.804	11.481.545	51.714.218

Lampiran 2.
 Realisasi Keuangan Berdasarkan KRO, Output dan Komponen Posisi Bulan Februari Tahun 2025 Sesuai Aplikasi SAKTI
 Kementerian Keuangan

KODE	URAIAN	TARGET		REALISASI			SISA ANGGARAN
		PAGU DIPA AWAL	FEBRUARI	FEBRUARI	S.D FEBRUARI	(%)	
Jumlah Seluruhnya		275.718.455.000	5.376.509.873	9.977.745.098	16.908.703.628	10,66	148.654.905.902
125.01.HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	3.093.765.246	1.571.560.858	382.645.364	1.607.360.858	3,36	46.306.879.142
HA 6875	Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1.263.459.386	1.362.629.280	331.527.519	1.387.629.280	5,88	22.246.268.720
AEA	Koordinasi	16.103.433.000	314.016.944	949.651.941	959.651.941	21,28	3.559.488.059
AEA 001	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan	3.232.364.000	63.031.098	111.608.069	111.608.069	11,51	857.976.931
AEA 002	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.107.919.000	41.104.421	249.861.165	259.861.165	75,56	94.036.835
AEA 003	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan	10.763.150.000	209.881.425	588.182.707	588.182.707	18,41	2.607.474.293

KODE	URAIAN	TARGET		REALISASI			SISA ANGGARAN
		PAGU DIPA AWAL	FEBRUARI	FEBRUARI	S.D FEBRUARI	(%)	
	Pelaporan Distribusi dan Cadangan Pangan						
AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	3.551.500.000	69.254.250	18.500.000	33.500.000	4,94	660.201.000
AFA 001	<i>NSPK Ketersediaan Pangan</i>	600.000.000	11.700.000	0	0	0,00	600.000.000
AFA 002	<i>NSPK Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</i>	951.500.000	18.554.250	18.500.000	33.500.000	48,18	19.900.000
AFA 003	<i>NSPK Distribusi dan Cadangan Pangan</i>	2.000.000.000	39.000.000	0	0	0,00	2.000.000.000
PBR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	9.031.205.000	176.108.498	240.536.882	240.536.882	13,80	1.502.473.118
PBR 001	Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan	1.851.205.000	36.098.498	24.059.540	24.059.540	6,49	346.916.460
PBR 002	Rekomendasi Kebijakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	3.180.000.000	62.010.000	216.477.342	216.477.342	28,04	555.602.658
PBR 003	Rekomendasi Kebijakan Distribusi dan Cadangan Pangan	4.000.000.000	78.000.000	0	0	0,00	4.000.000.000
QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	4.250.000.000	82.875.000	37.800.000	37.800.000	1,67	2.232.270.000
QDD.001	Pangan yang Terdistribusi	1.000.000.000	19.500.000	0	0	0,00	1.000.000.000
QDD.002	Gerakan Pangan Murah yang dilaksanakan	2.750.000.000	53.625.000	15.000.000	15.000.000	1,23	1.205.000.000

KODE	URAIAN	TARGET		REALISASI			SISA ANGGARAN
		PAGU DIPA AWAL	FEBRUARI	FEBRUARI	S.D FEBRUARI	(%)	
QDD.003	Kios Pangan yang dikembangkan	500.000.000	9.750.000	22.800.000	22.800.000	15,19	127.270.000
QMA	Data dan Informasi Publik	21.856.651.000	426.204.695	116.140.457	116.140.457	0,98	11.691.378.543
QMA 001	Data dan Informasi Ketersediaan Pangan	5.486.346.000	106.983.747	23.770.663	23.770.663	5,53	855.652.337
QMA 002	Data dan Informasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	15.370.305.000	299.720.948	92.369.794	92.369.794	0,89	10.673.355.206
QMA 003	Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan	1.000.000.000	19.500.000	0	0	0,00	1.000.000.000
RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	10.000.000.000	195.000.000	0	0	0,00	10.000.000.000
RAG.001	Sarana Logistik Pangan	7.000.000.000	136.500.000	0	0	0,00	7.000.000.000
RAG.002	Sarana Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	3.000.000.000	58.500.000	0	0	0,00	3.000.000.000
HA 6876	Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	53.577.000.000	1.044.751.500	0	0	0,00	53.577.000.000
AEA	Koordinasi	11.013.800.000	214.769.100	0	0	0,00	11.013.800.000

KODE	URAIAN	TARGET		REALISASI			SISA ANGGARAN
		PAGU DIPA AWAL	FEBRUARI	FEBRUARI	S.D FEBRUARI	(%)	
AEA 001	<i>Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengendalian Kerawanan Pangan</i>	3.981.760.000	77.644.320	0	0	0,00	3.981.760.000
AEA 003	Koordinasi, Sosialisasi, Koordinasi, Sosialisasi, Koordinasi mendukung Penyelamatan Pangan	7.032.040.000	137.124.780	0	0	0,00	7.032.040.000
AFA	<i>Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria</i>	400.000.000	7.800.000	0	0	0,00	400.000.000
AFA 001	NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan	400.000.000	7.800.000	0	0	0,00	400.000.000
PAD	Peraturan Presiden	440.000.000	8.580.000	0	0	0,00	440.000.000
PAD.001	RPerpres Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelamatan Susut dan Sisa Pangan (SSP)	440.000.000	8.580.000	0	0	0,00	440.000.000
PBR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	6.310.259.000	123.050.051	0	0	0,00	6.310.259.000
PBR.001	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan	1.600.000.000	31.200.000	0	0	0,00	1.600.000.000
PBR.004	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan	4.710.259.000	91.850.051	0	0	0,00	4.710.259.000
QEC	Bantuan Produk	18.983.200.000	370.172.400	0	0	0,00	18.983.200.000

KODE	URAIAN	TARGET		REALISASI			SISA ANGGARAN
		PAGU DIPA AWAL	FEBRUARI	FEBRUARI	S.D FEBRUARI	(%)	
QEC.001	Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian kerawanan pangan	18.400.000.000	358.800.000	0	0	0,00	18.400.000.000
QEC.103	Bantuan Pangan terfortifikasi dan Biofortifikasi	583,200,000	11.372.400	0	0	0,00	583,200,000
QMA	Data dan Informasi Publik	8.888.143.000	173.318.789	0	0	0,00	8.888.143.000
QMA 001	Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan	1.000.000.000	19.500.000	0	0	0,00	1.000.000.000
QMA.003	Data dan Informasi Penyelamatan Pangan	7.000.000.000	136.500.000	0	0	0,00	888.143.000
QMA.004	Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan	888.143.000	17.318.789	0	0	0,00	7.541.59.,000
RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	7.541.598.000	147.061.161	0	0	0,00	7.541.598.000
RAG 001	Sarana prasarana upaya penyelamatan pangan	7.541.598.000	147.061.161	0	0	0,00	7.541.598.000
HA 6877	Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	40.284.839.000	785.554.361	208.931.578	219.731.578	1,78	12.124.530.422
ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	1.243.760.000	24.253.320	0	0	0,00	1.243.760.000
ABR.002	Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu,	1.243.760.000	24.253.320	0	0	0,00	1.243.760.000

KODE	URAIAN	TARGET		REALISASI			SISA ANGGARAN
		PAGU DIPA AWAL	FEBRUARI	FEBRUARI	S.D FEBRUARI	(%)	
	Gizi, Label dan Iklan Pangan						
AEA	Koordinasi	17.349.130.000	338.308.035	94.206.622	94.206.622	2,86	3.196.245.378
AEA.001	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	7.860.000.000	153.270.000	44.571.574	44.571.574	2,73	1.590.810.426
AEA.002	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	4.628.480.000	90.255.360	6.115.180	6.115.180	0,48	1.257.944.820
AEA.003	Koordinasi, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	4.860.650.000	94.782.675	43.519.868	43.519.868	11,13	347.490.132
AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1.900.000.000	37.050.000	46.619.345	46.619.345	8,72	488.155.655
AFA.001	NSPK Penganekaragaman Konsumsi Pangan	600.000.000	11.700.000	46.619.345	46.619.345	99,56	205.655
AFA.002	NSPK Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan	1.000.000.000	19.500.000	0	0	0,00	1.000.000.000

KODE	URAIAN	TARGET		REALISASI			SISA ANGGARAN
		PAGU DIPALAWAL	FEBRUARI	FEBRUARI	S.D FEBRUARI	(%)	
	Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan						
AFA.003	NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	300.000.000	5.850.000	0	0	0,00	300.000.000
BDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	2.000.000.000	39.000.000	0	0	0,00	2.000.000.000
BDG 001	UMKM pangan lokal yang terfasilitasi penganeekaragaman pangan	2.000.000.000	39.000.000	0	0	0,00	2.000.000.000
PCA	Perizinan Produk	2.500.000.000	48.750.000	11.728.500	11.728.500	1,62	711.131.500
PCA 001	Sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	2.500.000.000	48.750.000	11.728.500	11.728.500	1,62	711.131.500
PEH	Promosi	3.500.000.000	68.250.000	34.095.005	44.895.005	4,17	1.041.304.995
PEH.001	Promosi Pangan B2SA	3.500.000.000	68.250.000	34.095.005	44.895.005	4,17	1.041.304.995
QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	2.404.489.000	46.887.536	12.490.106	12.490.106	0,00	754.999.894
QDB 001	Fasilitasi dan Pembinaan Pasar Pangan Segar Aman	904.729.,000	17.642.216	12.490.106	12.490.106	20,78	47.609.894

KODE	URAIAN	TARGET		REALISASI			SISA ANGGARAN
		PAGU DIPA AWAL	FEBRUARI	FEBRUARI	S.D FEBRUARI	(%)	
QDB 002	Otoritas Kompeten Keamanan Pangan yang dibina	1.499.760.000	29.245.320	0	0	0,00	1.499.760.000
QDD	Fasilitas dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	684.460.000	13.346.970	0	0	0,00	684.460.000
QDD.001	Kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganeekaragaman pangan	684.460.000	13.346.970	0	0	0,00	684.460.000
QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	2.998.000.000	58.461.000	9.792.000	9.792.000	0,70	1.379.838.000
QIA.002	Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	2.998.000.000	58.461.000	9.792.000	9.792.000	0,70	1.379.838.000
QMA	Data dan Informasi Publik	1.500.000.000	29.250.000	0	0	0,00	1.500.000.000
QMA.001	Data Situasi Konsumsi Pangan	1.500.000.000	29.250.000	0	0	0,00	1.500.000.000
RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	4.205.000.000	81.997.500	0	0	0,00	4.205.000.000
RAG.001	Sarana Keamanan dan Mutu Pangan	4.205.000.000	81.997.500	0	0	0,00	4.205.000.000
WA	Program Dukungan Manajemen	117.063.827.000	2.282.744.627	2.282.744.627	15.301.342.770	13,82	102.348.026.760

KODE	URAIAN	TARGET		REALISASI			SISA ANGGARAN
		PAGU DIPA AWAL	FEBRUARI	FEBRUARI	S.D FEBRUARI	(%)	
WA.6874	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	117.063.827.000	2.282.744.627	2.282.744.627	15.301.342.770	13,82	102.348.026.760
AEC	Kerja sama	1.224.972.000	23.886.954	1.458.000	1.458.000	0,16	923.514.000
AEC.001	Kerja Sama Bidang Pangan	1.224.972.000	23.886.954	1.458.000	1.458.000	0,16	923.514.000
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	94,699,016,000	1.846.630.812	7.342.152.084	11.458.593.874	12,42	84.936.786.916
EBA.956	Layanan BMN	525.011.000	10.237.715	45.580.000	45.580.000	8,68	479.431.000
EBA.957	Layanan Hukum	1.141.900.000	22.267.050	11.185.000	11.185.000	1,63	675.307.000
EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	2.899.500.000	56.540.250	115.821.815	263.881.826	9,87	2.557.898.185
EBA.959	Layanan Protokoler	792.600.000	15.455.700	113.039.052	114.398.052	19,70	467.560.948
EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.934.000.000	37.713.000	24.258.000	24.258.000	1,91	1.246.003.000
EBA.962	Layanan Umum	8.348.720.000	162.800.040	413.319.652	768.474.652	9,80	7.431.400.348
EBA.994	Layanan Perkantoran	79.057.285.000	1.541.617.058	6.618.948.565	10.230.816.344	13,00	72.079.186.435
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	2.313.304.000	45.109.428	0	695.307.060	52,91	1.314.054.000
EBB.951	Layanan Sarana Internal	2.313.304.000	45.109.428	0	695.307.060	52,91	1.314.054.000
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	1.887.686.000	36.809.877	15.187.500	15.187.500	0,80	1.872.498.500

KODE	URAIAN	TARGET		REALISASI			SISA ANGGARAN
		PAGU DIPA AWAL	FEBRUARI	FEBRUARI	S.D FEBRUARI	(%)	
EBC.954	Layanan Manajemen SDM	1.887.686.000	36.809.877	15.187.500	15.187.500	0,80	1.872.498.500
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	12.328.986.000	240.415.227	802.896.044	1.016.305.724	9,57	9.820.329.956
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	6.129.682.000	119.528.799	85.935.593	292.100.273	4,77	6.043.746.407
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.000.000.000	19.500.000	32.379.267	39.624.267	5,13	739.524.733
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1.945.500.000	37.937.250	265.652.900	265.652.900	19,06	1.128.393.100
EBD.965	Layanan Audit Internal	3.253.804.000	63.449.178	418.928.284	418.928.284	18,00	1.908.665.716
PAD	Peraturan Presiden	440.000.000	8.580.000	0	0	0,00	440.000.000
PAD 001	RPerpres tentang Rencana Pangan Nasional	440.000.000	8.580.000	0	0	0,00	440.000.000
QMA	Data dan Informasi Publik	3.669.863.000	71.562.329	219.035.125	2.089.035.125	64,62	3.013.524.875
QMA 001	Data dan Informasi Pangan	3.669.863.000	71.562.329	219.035.125	2.089.035.125	64,62	3.013.524.875
UAB	Sistem Informasi Pemerintahan	500.000.000	9.750.000	0	25.455.487	11,74	196.543.513
UAB 001	Sistem Informasi Pangan dan Gizi	500.000.000	9.750.000	0	25.455.487	11,74	196.543.513